



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025 – 2029

DISKOMDIGI



☎ 024 831914

🌐 diskominfo.jateng.go.id

📍 Jl. Menteri Supeno 1/2, Kota Semarang

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Agung Hariyadi, SE, MM NIP : 19701202 199003 1 002

Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah

Berdasar SK Gubernur Jawa Tengah Nomor
800.1.3.3/290/2025 Tanggal 07 – 05 – 2025
Bertugas untuk dan atas nama Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di Jalan Menteri Supeno I
Semarang, Mugassari, Kecamatan Semarang
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50243.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

- 1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
- 2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah



Agung Hariyadi, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701202 199003 1002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
DISKOMDIGI PROVINSI JAWA TENGAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.2.1 Kondisi Kepegawaian	19
2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana.....	23
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	49
2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah	53
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komdigi Jawa Tengah	57
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	57
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi, dengan aktivitas riil perangkat daerah :	58
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah	62
3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah.....	68
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Diskomdigi Prov. Jateng.....	69
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Diskomdigi Prov. Jateng	192
BAB V PENUTUP	201

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rincian ASN & Non-ASN per Bidang Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 2. 2 Pegawai Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur	20
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai ASN Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	21
Tabel 2. 4 Pegawai dengan Jabatan Fungsional Diskomdigi Prov. Jateng	22
Tabel 2. 5 Pegawai dengan Jabatan Fungsional Diskomdigi Prov. Jateng	22
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskomdigi Prov. Jateng.	24
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	48
Tabel 2. 8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	51
Tabel 2. 9 Perumusan Isu Strategis Diskomdigi Prov. Jateng	53
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskomdigi	60
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran serta Indikator yang Berkaitan Dengan Kesekretariatan	61
Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	62
Tabel 3. 4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	64
Tabel 3. 5 Manajemen Risiko Strategis Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah	68
Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Diskomdigi Prov. Jateng	73
Tabel 4. 2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	187
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	193
Tabel 4. 4 Indikator Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	195
Tabel 4. 5 Tabel Indikator Kinerja Kunci	198

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra2

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....4

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dikomdigi Prov. Jateng.....10

Gambar 2. 2 Pegawai ASN Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan
Tingkat Pendidikan21

Gambar 2. 3 Aset Bangunan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah23

Gambar 2. 4 Capaian Bidang IKP Diskominfo Prov. Jateng.....43

Gambar 2. 5 Capaian Bidang Statistik Diskominfo Prov. Jateng44

Gambar 2. 6 Capaian Bidang Teknologi Informasi Teknologi Diskominfo Prov.
Jateng.....45

Gambar 2. 7 Capaian Bidang E-Government Diskominfo Prov. Jateng.....46

Gambar 2. 8 Capaian Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo
Prov. Jateng47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa untuk mencapai tujuan negara secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Keterpaduan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Rencana pembangunan harus selaras antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Keberadaan unit kerja pada pemerintah daerah merupakan salah satu motor penggerak pembangunan di daerah, sehingga setiap unit kerja atau organisasi perangkat daerah harus memiliki rencana strategis pembangunan yang tersinkronisasi dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

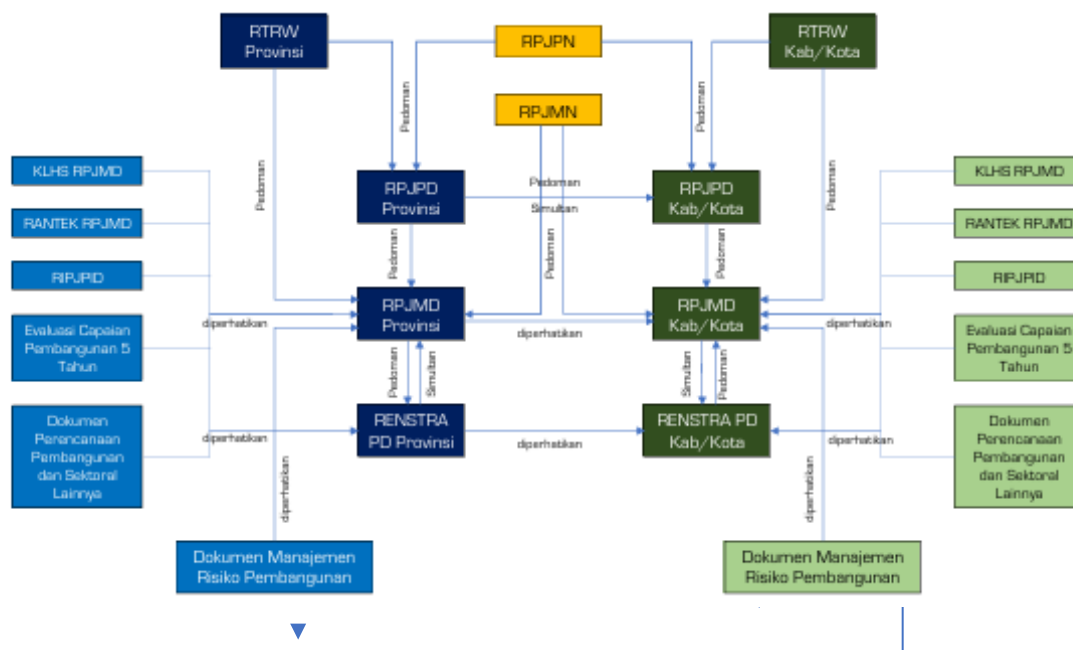
Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah (Renstra Diskomdigi), merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan kepala daerah, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD.

Renstra Diskomdigi memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Renstra berperan dalam mengarahkan kinerja organisasi agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RENJA) perangkat daerah, sehingga program kegiatan tahunan yang direncanakan lebih

Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
- 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
- 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2025-2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional, RPJMD yang disusun digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra PD. Renstra PD secara hierarki berkedudukan dibawah RPJMD, dengan kata lain Renstra PD merupakan terjemahan RPJMD ke dalam perencanaan perangkat daerah, sehingga rencana kegiatan PD yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dimaksud dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam rangka menguatkan era pemerintahan digital pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan digitalisasi tata kelola pemerintah pada periode sebelumnya dan sekarang berada pada tahap pembangunan layanan terintegrasi dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui implementasi Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, antara lain Pelaksanaan integrasi aplikasi yang dimulai dari pemetaan aplikasi, pembelian lisensi, metode, arsitektur layanan, tenaga ahli/tim ahli, help desk, rapat koordinasi; Implementasi Pencegahan dan Pengamanan Informasi dari ancaman insiden siber oleh Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) di Pemprov Jateng;

Keberadaan Renstra Dinas Komdigi mendukung capaian target RPJMD Jawa Tengah, yang juga termanifestasikan pada program prioritas Gubernur. Adapun dukungan program/kegiatan Diskomdigi untuk mencapai target kinerja Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 yaitu:

1. Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN): Penyusunan Peraturan Gubernur dan Integrasi Aplikasi;
2. Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam “Jateng Ngopeni Nglakoni”, dan menyiapkan kebutuhan SDM di Pusat dan PPID serta Merubah Peraturan Gubernur terkait dengan PPID;
3. Pemenuhan dan Peningkatan akses internet gratis baik di desa (102 desa blankspot) maupun untuk internet sektor publik pada koperasi merah putih, internet sektor pendidikan, serta internet kecamatan berdaya;
4. Mendorong terwujudnya integrasi Satu Data Jateng: Penyelenggaraan

proses bisnis Satu Data Jateng sesuai dengan ketentuan dan mewujudkan program Big Data atau integrasi data;

5. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK berupa penyusunan peraturan gubernur, identifikasi ahli IT, pembentukan satgas.

Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Renstra Tahun 2025 - 2029 secara bertahap dan berkesinambungan melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta program pengelolaan aplikasi informatika, dan didukung program pada urusan persandian maupun pengelolaan data statistik yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa pasal 3 (d) disebutkan pembentukan perangkat daerah meliputi poin 13 Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Perda yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2025, maka keberadaan Dinas Kominfo berubah nama menjadi Dinas Komunikasi Informatika dan Digital atau Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah. Secara kewenangan Diskomdigi mengelola tugas dan fungsi menggantikan dinas lama Diskomdigi, meskipun pembagian tugas fungsi struktur bidang dan unit di bawahnya berbeda. Dengan demikian Renstra unit kerja 2025-2029 mengenai urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik menjadi Renstra yang mendukung terwujudnya pelayanan publik berbasis digital di Jawa Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
4. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

- Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri PAN dan RB PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan IKU;
 18. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan);
 20. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 2 tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025–2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk memberikan arah strategis dan menjadi pedoman perangkat daerah dalam periode lima tahun ke depan dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah :

- a. Menjadi pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan.
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan untuk periode 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat tentang Gambaran pelayanan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah meliputi : tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta permasalahan pelayanan dan isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan agar lebih terarah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta kinerja, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan atau indikator kinerja program pada masing masing urusan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansi kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

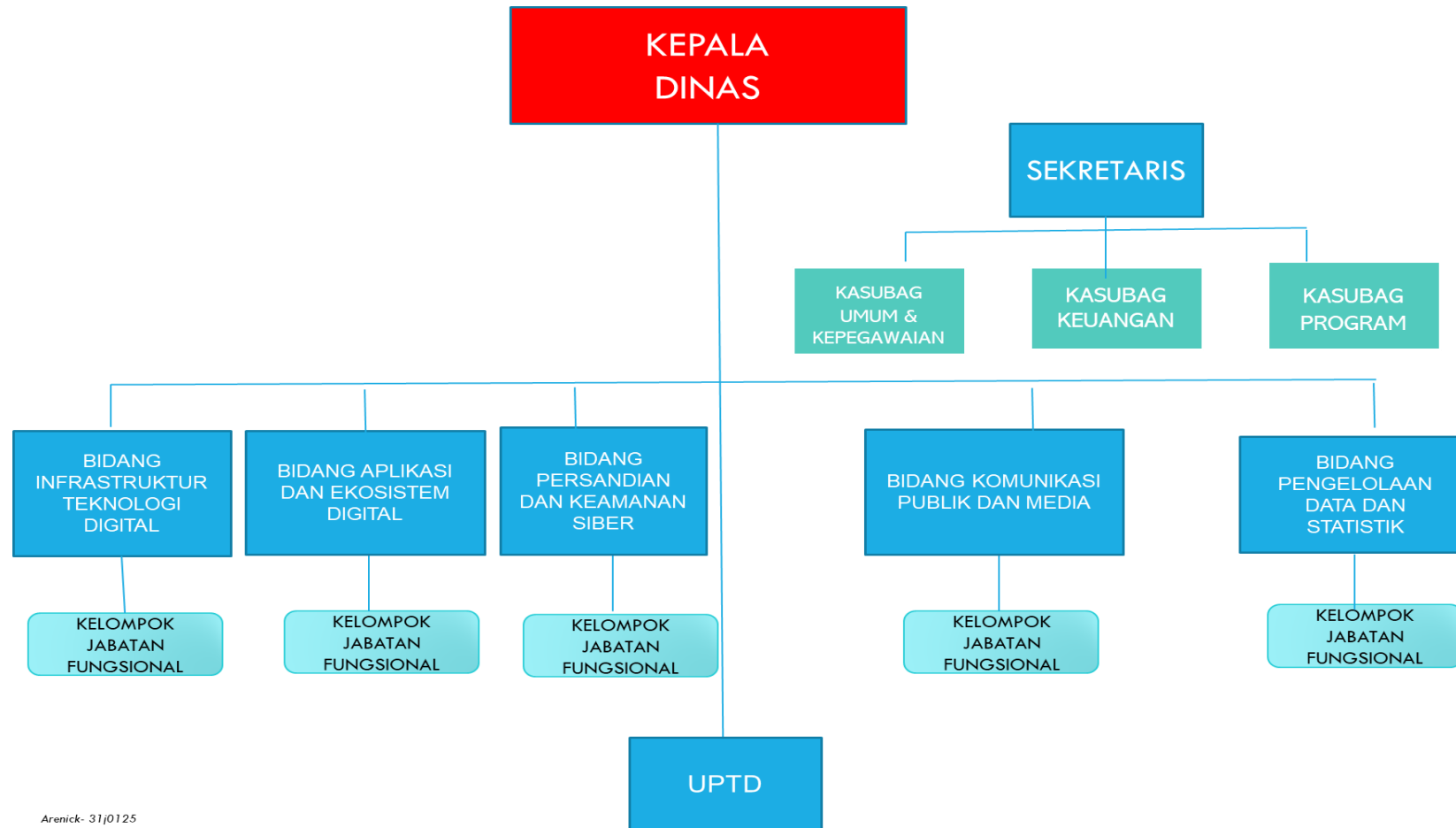
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMDIGI PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Diskominfo Provinsi Jawa Tengah pada awal berdirinya dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.70 Tahun 2016, kemudian perbaharui kembali berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 55 Tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2025 Gubernur Jawa Tengah melaksanakan percepatan penataan kelembagaan perangkat daerah melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025, dimana nomenklatur yang baru yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah dengan Tipe A dan kewenangannya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian

- a. Perumusan kebijakan Bidang Komunikasi Publik dan Media, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E- Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah, sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Diskomdigi yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Komunikasi Publik dan Media, Bidang Pengelolaan Data dan Statistik, Bidang Infrastruktur Teknologi Digital, Bidang Aplikasi Pemerintah Digital, Bidang Persandian dan Keamanan Siber, UPT Pusat Data serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar dibawah.



Arenick- 31j0125

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. **Sekretariat**

Sekretariat memiliki tugas dan fungsi melaksanakan dukungan Administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi:

1. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian yaitu Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

1. Subbagian Program : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program;

2. Subbag Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
3. Subbag Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. **Bidang Komunikasi Publik dan Media**

Bidang Komunikasi Publik dan Media memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

a. Tugas:

Menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan lembaga dan kehumasan, analisis isu dan pendapat masyarakat, serta pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi krisis pemerintah dan ekosistem media informasi dan dokumentasi.

b. Fungsi:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan lembaga komunikasi dan kehumasan, analisis isu dan pendapat masyarakat, serta pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi krisis pemerintah dan ekosistem media informasi dan dokumentasi;
2. Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM kehumasan dan fasilitasi, pembinaan Infrastruktur kemitraan lembaga komunikasi dan kehumasan, analisis isu dan pendapat masyarakat, serta pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi krisis pemerintah dan ekosistem media informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan lembaga komunikasi dan kehumasan, analisis isu dan pendapat

masyarakat, pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi krisis pemerintah serta ekosistem media informasi dan dokumentasi;

4. Pelaporan dan rekomendasi di bidang kemitraan lembaga komunikasi dan kehumasan, analisis isu dan pendapat masyarakat, serta pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi krisis pemerintah dan ekosistem media informasi dan dokumentasi.
- c. Pokja di Bidang Komunikasi Publik dan Media terdiri atas 3 (tiga) yaitu :
1. Pokja Analisis Isu, Kemitraan dan Kehumasan : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan pemberdayaan komunitas informasi, forum komunikasi media tradisional dan kelompok kehumasan;
 2. Pokja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan permohonan informasi;
 3. Pokja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan pengelolaan publikasi media.

3. **Bidang Pengelolaan Data dan Statistik**

Bidang Pengelolaan Data dan Statistik melaksanakan tugas dan fungsi mengelola data Statistik Sektoral dan Geospasial di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

a. Tugas:

Menyelenggarakan persiapan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang Informasi Geospasial Tematik, Data Statistik Sektoral dan Tata Kelola Satu Data Jawa Tengah.

b. Fungsi:

1. Penyiapan rencana kerja di bidang Informasi Geospasial

Tematik, Data Statistik Sektoral dan Tata Kelola Satu Data Jawa Tengah di Daerah; Pelaksanaan Fasilitasi layanan Informasi Geospasial Tematik, Data Statistik Sektoral dan Tata Kelola Satu Data Jawa Tengah;

2. Monitoring dan evaluasi di bidang Informasi Geospasial Tematik, Data Statistik Sektoral dan Tata Kelola Satu Data Jawa Tengah;
 3. Pelaporan dan rekomendasi di bidang Informasi Geospasial Tematik, Data Statistik Sektoral dan Tata Kelola Satu Data Jawa Tengah;
- c. Pokja di Bidang Pengelolaan Data dan Statistik terdiri atas 3 (tiga) yaitu:
- 1 Pokja Pengelolaan Data Geospasial : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan tata kelola Data Geospasial Pemerintah Provinsi;
 - 2 Pokja Pengelolaan Integrasi Data: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan integrasi dan kompilasi data sektoral;
 - 3 Pokja Tata Kelola Data Statistik : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan selaku Walidata Jateng;

4. **Bidang Infrastruktur Teknologi Digital**

Bidang Infrastruktur Teknologi Digital melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan dan layanan Infrastruktur Digital

a. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta evaluasi di bidang Kebijakan Pengelolaan Infrastruktur, Strategi dan Akselerasi Infrastruktur Digital, serta Layanan Infrastruktur digital.

b. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan mengenai Pengembangan Infrastruktur dan Perangkat Digital di daerah, strategi akselerasi teknologi

- digital, sistem elektronik publik, audit TIK, pendaftaran sistem elektronik publik (domain), fasilitasi bandwidth internet pemerintah daerah, layanan perbaikan dan pengelolaan jaringan antar OPD, pengelolaan teknologi infrastruktur baru;
2. Pelaksanaan kebijakan terkait Pengembangan Infrastruktur dan Perangkat Digital di daerah, strategi akselerasi teknologi digital, sistem elektronik publik, audit TIK, pendaftaran sistem elektronik publik (domain), fasilitasi bandwidth internet pemerintah daerah, layanan perbaikan dan pengelolaan jaringan antar OPD, pengelolaan teknologi infrastruktur baru di daerah;
 3. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun evaluasi mengenai Pengembangan Infrastruktur dan Perangkat Digital di daerah, strategi akselerasi teknologi digital, sistem elektronik publik, audit TIK, pendaftaran sistem elektronik publik (domain), fasilitasi bandwidth internet pemerintah daerah, layanan perbaikan dan pengelolaan jaringan antar OPD, pengelolaan teknologi infrastruktur baru;
 4. Monitoring dan evaluasi mengenai Pengembangan Infrastruktur dan Perangkat Digital di daerah, strategi akselerasi teknologi digital, sistem elektronik publik, audit TIK, pendaftaran sistem elektronik publik (domain), Fasilitasi bandwidth internet pemerintah daerah, layanan perbaikan dan pengelolaan jaringan antar OPD, pengelolaan teknologi infrastruktur baru.
- c. Pokja di Bidang Infrastruktur Teknologi Digital terdiri atas 3 (tiga) yaitu:
1. Pokja Pengelolaan Infrastruktur Digital : pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan infrastruktur digital berupa jaringan fiber optik dan backbone terkoneksi antara OPD Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. Pokja Strategi dan akselerasi Infrastruktur Digital : pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan strategi akselerasi teknologi digital melalui penyusunan road map infrastruktur terkoneksi;

3. Pokja Layanan infrastruktur digital : pengembangan, pemanfaatan, pengawasan, dan pemantauan layanan infrastruktur digital telekomunikasi khusus.

5. **Bidang Aplikasi Pemerintah Digital**

Bidang Aplikasi Pemerintah Digital melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Aplikasi E Government, Tata Kelola SPBE, serta Layanan Ekosistem Digital

a. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan rencana kerja, pelaksanaan kebijakan, pembinaan pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian dukungan administrasi di bidang Pengembangann Aplikasi E Government, Tata Kelola SPBE, serta Layanan Ekosistem Digital .

b. Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekosistem *E-Government*;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola *E-Government*;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Pokja di Bidang Aplikasi Pemerintahan Digital terdiri atas 3 (tiga) yaitu:

1. Pokja Pengembangan Pemerintah Digital : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan pengelolaan Aplikasi Pemerintah Digital;
2. Pokja Tata Kelola Pemerintah Digital : melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan capaian Indeks Pemerintah Digital / Indeks SPBE;

3. Pokja Ekosistem Pemerintah Digital : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi dan pelaporan pembangunan ekosistem digital Pemerintah Provinsi.

6. **Bidang Persandian dan Keamanan Siber**

Bidang Persandian dan Keamanan Siber melaksanakan tugas dan fungsi bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah.

b. Fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Pokja di Bidang Persandian dan Keamanan Siber terdiri atas 3 (tiga) yaitu:

1. Pokja Tata Kelola Persandian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola

persandian;

2. Pokja Pengamanan Persandian dan Informasi : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
3. Pokja Sistem Komunikasi Intra Pemerintah : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah.

7. UPT Pusat Data

UPT Pusat Data memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Instansi lain serta pihak lain

a. Tugas :

Melaksanakan tugas teknis operasional dan layanan serta kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Instansi lain serta pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional dan layanan di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
2. Perumusan kebijakan teknis operasional dan layanan di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
3. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan layanan di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
4. Evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
5. Pembinaan dan pelatihan teknis di bidang pengelolaan pusat data dan sarana informatika;

6. Pengelolaan ketatausahaan; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Data mempunyai tugas :
 1. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 2. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 3. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 4. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 5. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 6. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 7. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 8. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 9. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai sampai dengan Semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 225 orang dengan jumlah ASN sebanyak 118 orang dan Non ASN sebanyak 107 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Rincian ASN & Non-ASN per Bidang Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	PNS		PPPK		Non ASN		Grand Total
	L	P	L	P	L	P	
SEKRETARIAT	8	15	4	5	18	3	53
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7	7	3	4	16	6	43
BIDANG STATISTIK	7	6	1		11	3	28
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	10	4		1	6	2	23
BIDANG E-GOVERNMENT	7	6	5		19	10	47

BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	11	3	1		10	2	27
Grand Total	50	41	14	10	80	26	221

Sumber: Dinas Komdigi, Oktober 2025 (menggunakan nama bidang Diskomdigi yang lama) Berdasarkan data kondisi kepegawaian Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Juni 2025, total pegawai ASN dan Non ASN sebanyak 260 orang, terdiri dari 169 (65%) laki laki dan 91 (35%) orang perempuan, menjalankan tusi Diskomdigi sesuai dengan bidangnya masing masing, Kondisi kepegawaian pada Diskomdigi tidak sesuai dengan kuota pada peta jabatan sehingga membutuhkan tambahan pegawai yang berkompeten. Sedangkan non asn terdiri dari tenaga ahli dan calon PPPK paruh waktu.

a. Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan umur

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin dan umur kondisi Oktober 2025 sebagaimana tabel berikut:

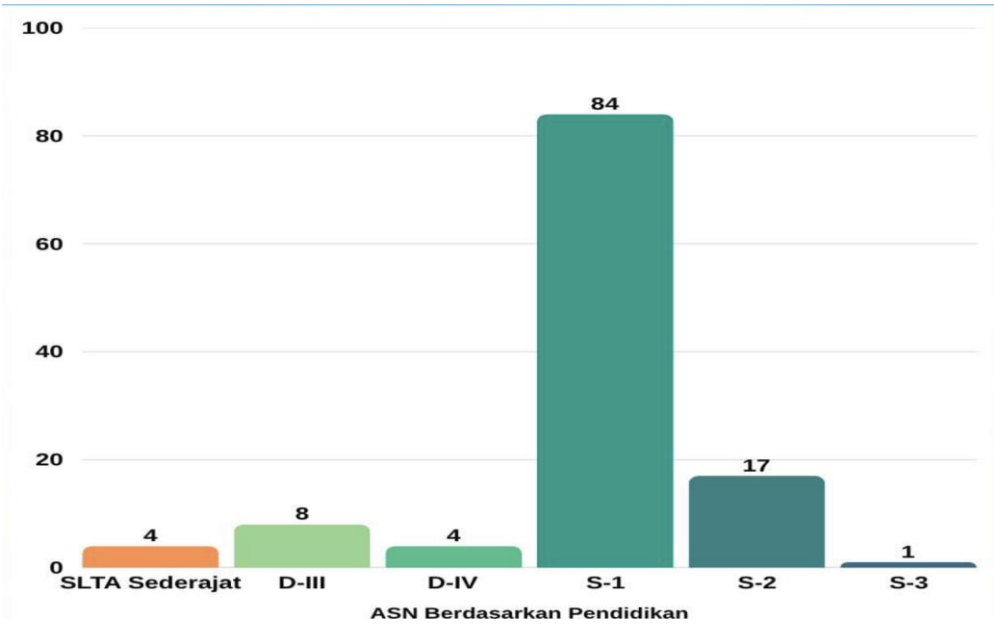
Tabel 2. 2 Pegawai Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

UNIT KERJA	RANGE USIA								JUMLAH
	20-30		31-40		41-50		51-60		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SEKRETARIAT	4	5	12	3	8	9	6	6	53
BIDANG IKP	6	8	12	6	5	3	3		43
BIDANG STATISTIK	10	2	2	5	4	2	3		28
BIDANG TIK	4	3	9	2	3	2			23
BIDANG E-GOV	8	8	17	6	5	1	1	1	47
BIDANG PDKI	7	1	7	2	5		3	2	27
	39	27	59	24	30	17	16	9	221

Berdasarkan Gambar 2.1 dan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Dan dapat dilihat pula Sebagian besar pegawai di rentang umur 26 sampai dengan 35 tahun.

b. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan (Oktober 2025), dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2.



Gambar 2. 2 **Pegawai ASN Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan**
sumber: Buku Saku Pegawai Dinas Komdigi Semester I - 2025

Tabel 2. 3 **Jumlah Pegawai ASN Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.**

Bidang	S3		S2		S1		D-IV		D3		SLTA		JUMLA H	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Sekretariat	1		2	3	5	10	1		1		6	1	16	14
TIK			3	1	8	3							11	4
PDKI			3		4	5	1		2		1	2	11	7
IKP			3	1	6	7				1			9	9
E-GOV			1	1	5	6			1				7	7
STATISTIK			3		5	10		1		1			8	12
TOTAL	1		15	6	33	41	2	1	4	2	7	3	62	53

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Doktor (S3) dengan sebagian besar pegawai ASN berpendidikan S1 (64.35%) dan S2 (18.26%).

c. **Jabatan Fungsional Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 71 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, berikut gambaran pegawai

dengan jabatan fungsional di Diskomdigi per Oktober 2025 pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 *Pegawai dengan Jabatan Fungsional Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah*

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	INSTANSI PEMBINA
1	PRANATA KOMPUTER	32 ORANG	BPS
2	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	16 ORANG	KEMENKOMDIGI
3	SANDIMAN	4 ORANG	BSSN
4	MANGGALA INFORMATIKA	1 ORANG	BSSN
5	STATISTISI	7 ORANG	BPS
6	SURVEYOR PEMETAAN	1 ORANG	BMKG
7	ANALIS SDM APARATUR	2 ORANG	BKN
8	ARSIPARIS	2 ORANG	ANRI
9	PERENCANA	1 ORANG	BAPPENAS
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	66 ORANG	
10	PELAKSANA UMUM	42 ORANG	
11	STRUKTURAL	10 ORANG	

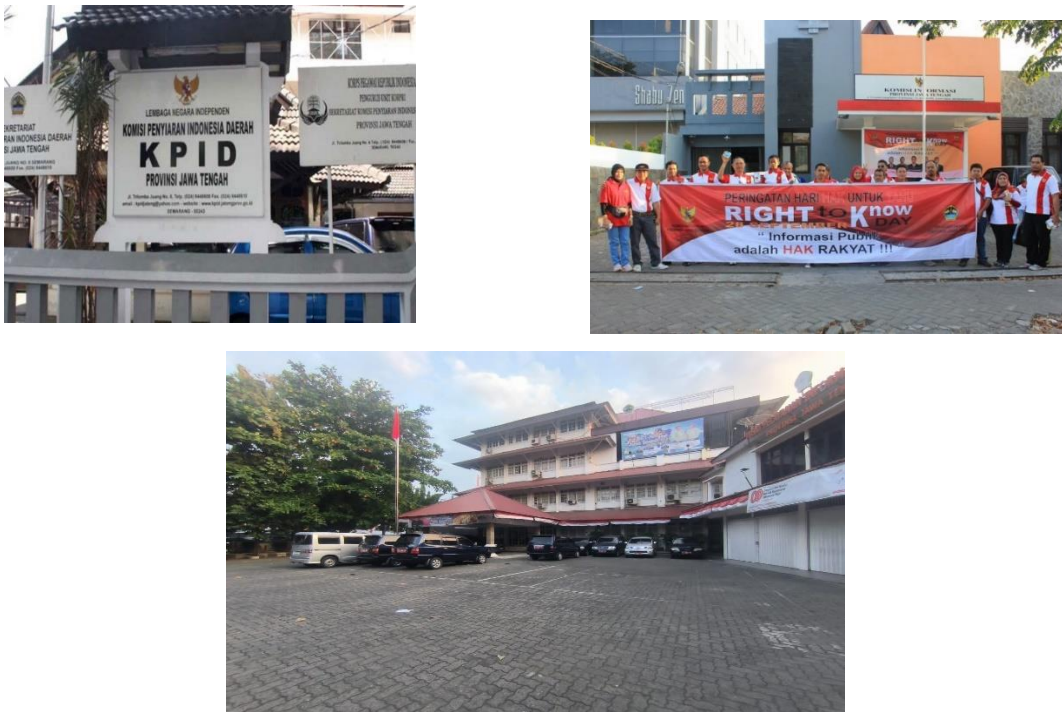
Tabel 2. 5 *Pegawai dengan Jabatan Fungsional Diskomdigi Prov. Jateng*

Bidang	Pranata Komputer			Pranata Humas			Sandiman		Manggala Informatika	Statistisi		Jml
	Tera mpil	Ahli Perta ma	Ahli Mud a	Terampil	Ahli Pertama	Ahli Muda	Penyelia	Ahli Muda	Ahli Muda	Ahli Perta ma	Ahli Mu da	
Sekre	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	5
TIK	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PDKI	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	5
IKP	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	8
E-GOV	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Statistik	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3	7
TOTAL	2	7	7	1	4	7	1	1	1	2	3	36

2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi, tersebut meliputi ruang dan peralatan kerja, serta sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana sudah cukup memadai, namun peningkatan prasarana dan sarana masih perlu dilakukan guna meningkatkan serta mengoptimalkan kinerja.

a. Aset Bangunan Tersertifikat (Kantor Diskomdigi dan KI Jateng) .



Gambar 2. 3 Aset Bangunan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

b. Transportasi

Kendaraan roda 2 sebanyak 4 (Empat) Unit, kendaraan roda 3 sebanyak 1 (Satu) Unit, kendaraan roda 4 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Unit, dan Bus sebanyak 1 (Satu) Unit.

c. Ruang Rapat

Ruang pertemuan Dinas Komdigi meliputi Ruang PPID, Ruang Podcast, Ruang Meeting Kecil, Ruang Rapat Literasi Lantai 1, Ruang Rapat Aplikasi Lantai 4, Ruang Rapat Fiber Optik Lantai 4, dan Ruang Rapat Dharma Wanita.

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2. 6 *Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah.*

Renstra PD Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Renstra PD Tahun 2018 - 2023																			
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
Tujuan																				
1.	Tujuan 1 : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indeks SPBE	Angka				2 .88	3. 10	3.2 7	3. 33		4. 2	2. 74	3. 98	4. 26		14 5. 83	88 .38	12 1. 71	12 7. 93	
Sasaran																				
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah																			
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka				2 .94	3 .41	3 .53	3 .65		2 .51	2 .3	3 .50	4 .80		1 1 8 .03	6 7 .44	99 .15	1 3 1 .51	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka				2 . 5 1	3 . 7 1	3 . 8 3	3 . 9 5		3 . 7 1	2 . 5	3 . 1 0	3 . 9 0		1 4 7 . 8 1	6 7 . 3 6	96 .6 1	9 3 . 7 3	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Renstra PD Tahun 2018 - 2023																			
	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka				3. 20	4.4 3	4.1 7	4.3 0		4.6 7	3.4 9	4.6 2	4.6 3		14 5.9 4	85. 96	11 0.7 9	10 7.6 7	
c.1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Persentase Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%				40	60	70	80		40	60	75	80		100	100	107.14	100	
	Persentase aplikasi layanan publik yang terintegrasi	%				50	60	70	85		55	65	80	85		110	108.33	100	100	
c.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.																			
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	%				64	71	78	85		74.65	80.88	81	87.54		116.64	113.92	103.85	102,98	
	URUSAN STATISTIK																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.2	Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral																			
	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%				30.36	63.72	81.76	95.65		176.26	95.61	85.70	95.65		580.57	150.20	104.82	100.00	
C.3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.																			
	Persentase ketersediaan data sektoral.	%				79	89	95	100		169.59	89	108			211.67	100	113.68	100,74	
	Persentase Badan Publik yang terbuka.	%				76	84	92	100		76	84	92			100	100	100	100	

URUSAN PERSANDIAN

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B.3	Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)																			
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Angka				1	2	3	3+		2	3	3+	3+		200	150	100	100.0	
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	daerah.																			
	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	%				33.33	50	66.67	100		33.33	50	70	100		100	100	100	100	
	NON URUSAN																			
A.2	Tujuan 2 :																			
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%				52.50	62.50	72.50	81.25		81.76	82.18	82.18	87.54		155.73	131.48	113.35	107.74	
	Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pelayanan Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%				52.50	62.50	72.50	81.25		81.76	82.18	82.18	87.54		155.73	123.80	113.53	107.74	
	Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi																			
	Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
	Sasaran 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Perangkat Daerah																			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka				58	65	72	81		80.74	80.47	81.74	81.75		139.21	123.80	113.53	100.93	
	Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi																			
	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	

Renstra PD Tahun 2024 - 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B	Renstra PD Tahun 2024 - 2026																			
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
Tujuan																				
1.	Tujuan 1 : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah																			
	Indeks SPBE	Angka								4.27					4.42					103.51

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Sasaran																				
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah																			
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka								4 . 8 0					4 . 9 0					1 0 2 . 0 8
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka								3 . 9 0					4 . 2 0					1 0 7 . 6

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																				9

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B	Renstra PD Tahun 2024 - 2026																			
	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka								4,46					4,75					102,59
c.1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika														72					
	Persentase layanan pemerintahan	%								15					15					100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	berbasis elektronik yang terintegrasi																			
c.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.																			
	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	%								78					90,14					115,56
	URUSAN STATISTIK																			
B.2	Sasaran 2 : Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%								31					31					100.0
C.3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.																			
	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%								24					24					100
URUSAN PERSANDIAN																				
B.3	Sasaran 3 : Meningkatkan Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Berbasis Elektronik (SPBE)																			
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Angka								3+(636)					3+(637)					100.15
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.																			
	Persentase PD memiliki Keamanan Informasi >80.	%								40					40					100
	NON URUSAN																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.2	Tujuan 2 :																			
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%								68					69.61					102.36
	Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah																			
	Nilai Kepuasan Masyarakat	%								78					85.74					109.92
	Program Urusan Penunjang																			

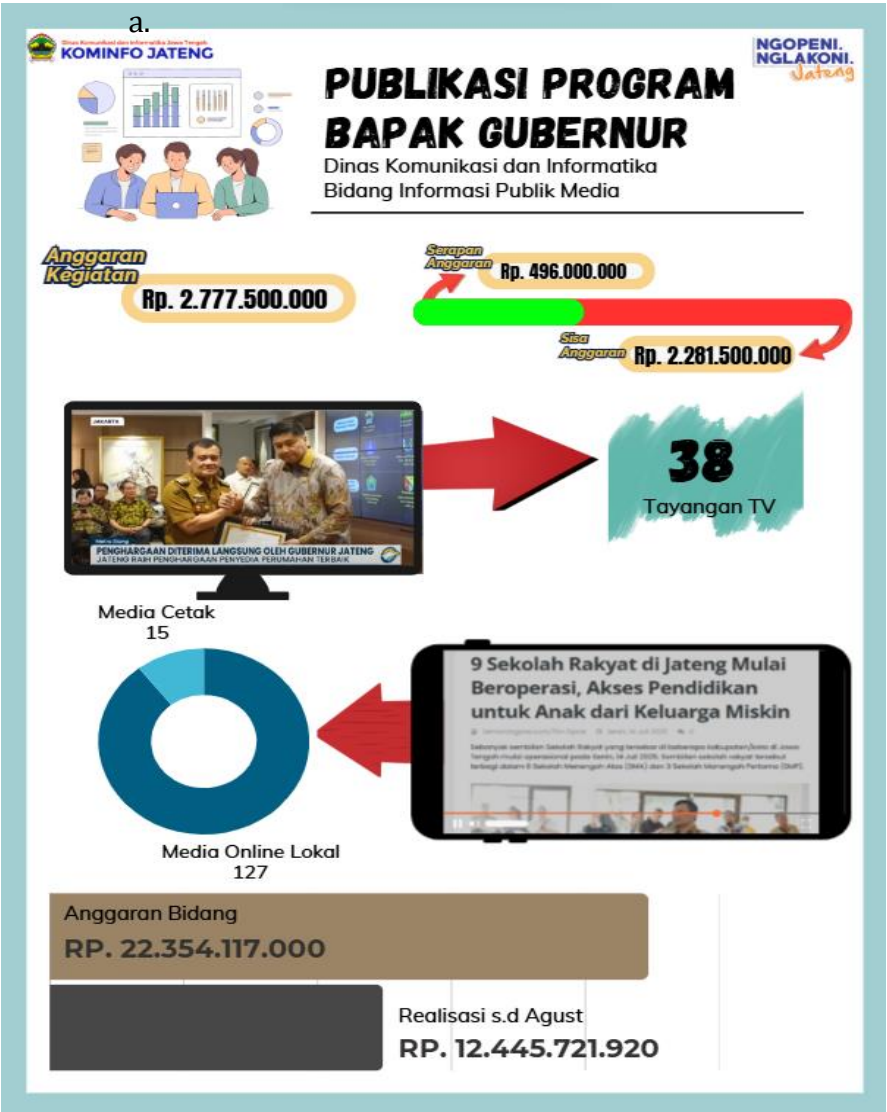
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pemerintah Daerah Provinsi																			
	Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah	%								100					100					100
	Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka								2.6					2.74					105.38
	Program Urusan Penunjang Pemerintah																			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Daerah Provinsi																			
	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi	%								100					100					100

Berdasarkan Tabel diatas terkait dengan capaian kinerja tujuan 1 sesuai dengan Renstra Diskominfo Prov Jateng Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Diskominfo Prov Jateng Tahun 2024 – 2026 yaitu “Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah”, tidak ditemukan adanya kesenjangan/gap layanan baik di level tujuan sasaran maupun program. Pada tujuan terkait dengan Indeks SPBE, hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih angka indeks SPBE sebesar 4,42 dengan predikat “Memuaskan”. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 4,26, mengalami peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan, yaitu sebesar 0,16 poin. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SPBE dari Kemenpan RB pada 4 domain penilaian yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.

Berdasarkan Tabel Rasio terkait dengan sesuai dengan Renstra Diskominfo Prov Jateng Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Diskominfo Prov Jateng Tahun 2024 – 2026 yaitu Capaian paling tinggi sebesar 109,92% laju pemanfaatan data sektoral (**Sangat Tinggi**) pada Nilai Kepuasan Diskomdigi masyarakat Jawa Tengah, yang diukur melalui indikator Indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan capaian terendah yaitu sebesar 100% (**Sangat Tinggi**). Capaian tersebut dipengaruhi oleh instrumen pendukung kinerja program dan kegiatan yaitu : Portal Data, Dashboard Big Data, dan *Government Resource Management System* (GRMS) yang merupakan bangunan sistem aplikasi terintegrasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana sistem aplikasi ini terdiri atas sistem *e-budgeting*, *e-project planning*, e-HSB, e-penatausahaan, *e-delivery*, *e-controlling*, *e-monev* dan *Government Planning Handbook* (GPH), serta aplikasi *networking* yang terdiri atas *system cloud server*, *video/audiostreaming*, *DNSX filter*, *voip gateway server*, *nms*, *ap controller*, *the dude* dan inventarisasi yang mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah; SOP Layanan Pusat Data; SOP Rekomendasi Teknis; SOP Fasilitasi Liputan; SOP Fasilitasi Streaming; serta SDM PNS Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah sejumlah 100 orang PNS yang terdiri dari Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat (Humas), Statistisi, Sandiman dan Fungsional Umum.

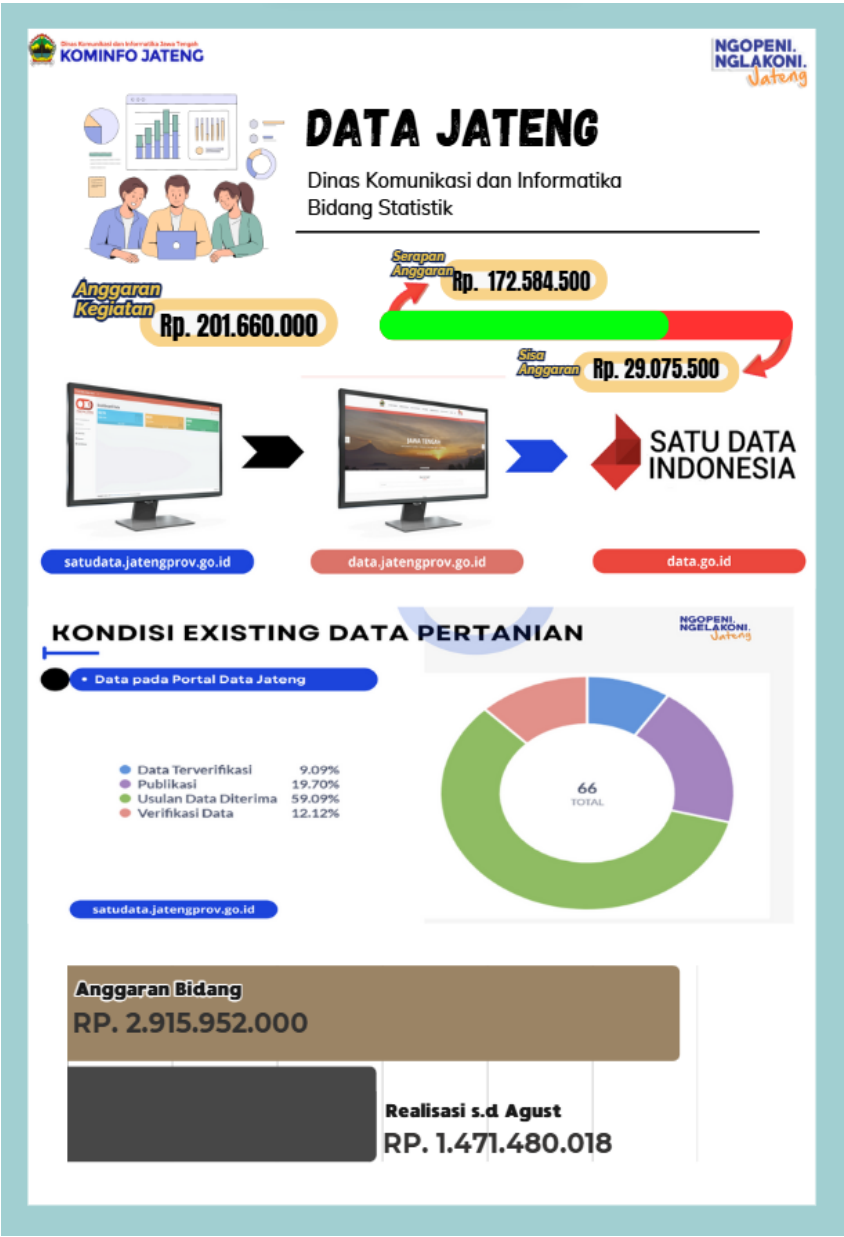
1. Bidang Komunikasi Publik dan Media



Gambar 2. 4 Capaian Bidang IKP Diskominfo Prov. Jateng

Capaian kinerja urusan Kominfo pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan program pengelolaan Informasi dan Kumunikasi Publik pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu berupa publikasi program Bapak Gubernur Jawa Tengah sebanyak : 38 tayangan TV, 15 media cetak, dan 127 media online lokal

2. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik



Gambar 2. 5 Capaian Bidang Statistik Diskominfo Prov. Jateng

Capaian kinerja urusan Kominfo pada bidang Statistik dan program penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu berupa Satu Data Jateng yaitu pengelolaan dan publikasi data melalui satudata.jatengprov.go.id ; data.jatengprov.go.id dan data.go.id

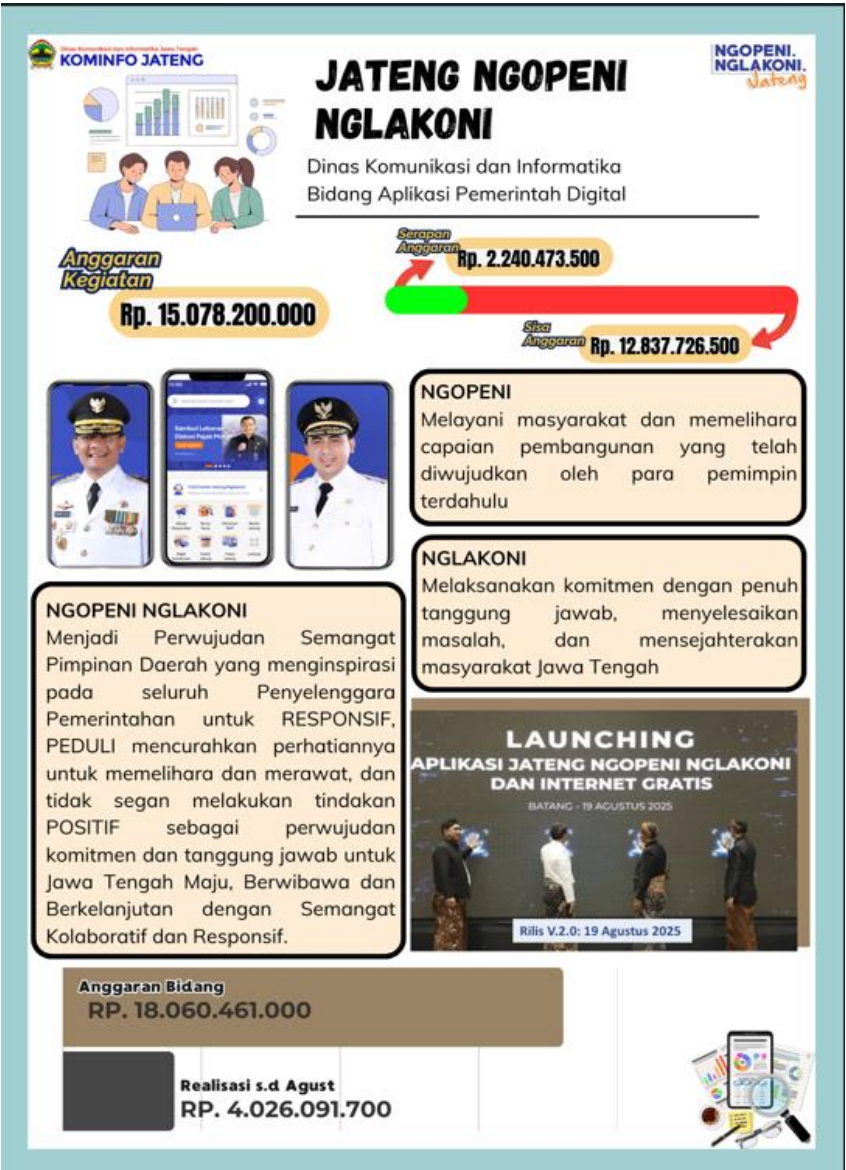
3. Bidang Infrastruktur Teknologi Digital



Gambar 2. 6 Capaian Bidang Teknologi Informasi Teknologi Diskominfo Prov. Jateng

Capaian kinerja urusan Kominfo pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu berupa Internet Gratis dengan realisasi yaitu 170 desa internet gratis, 30 area sektor publik, 37 sektor pendidikan, dimana secara akumulatif sejak tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan internet gratis sudah dilaksanakan di 837 lokasi .

4. Bidang Aplikasi Pemerintah Digital



Gambar 2. 7 Capaian Bidang E-Government Diskominfo Prov. Jateng

Capaian kinerja urusan Kominfo pada Bidang E-Government dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu berupa Jateng Ngopeni Ngelakoni (JNN) yang sudah di launching pada tanggal 19 Agustus 2025.

5. Bidang Persandian dan Keamanan Siber



Gambar 2. 8 Capaian Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo
Prov. Jateng

Capaian kinerja urusan Kominfo pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu berupa Keamanan Informasi meliputi : capaian indeks KAMI Versi 5.0 sebesar 855 (Baik); Terakreditasi SNI ISO/IEC 27001: 2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

tabel 2. 7 *Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan*

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Pagu Indikatif Renstra Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pendapatan															
	Belanja	244.404.892	276.590.646	276.590.646	310.705.174	78.872.18 4.000	79.916.560.000	106.994.593.000	144.796.793.000	113.270.576	70.201.042.000	61.626.459	99.624.389	140,283,526	114,193,842,722	68.510.596.902
	Pembiayaan															

2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang diperoleh dari hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra PD Kab/Kota, hasil telaah RTRW, & KLHS, guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskomdigi untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang lebih cepat, tepat, mudah dan murah.
- b. Penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah belum merata;
- c. Belum meratanya kemampuan literasi digital masyarakat;
- d. Perlunya penguatan kapasitas digital bagi para ASN;
- e. Ketersediaan layanan internet untuk pemerintahan daerah dan masyarakat belum optimal baik dari aspek kualitas jaringan maupun kecepatan internet;
- f. Pesatnya perkembangan TIK dalam era Revolusi Industri 4.0;
- g. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Jawa Tengah;
- h. Masih terbatasnya SDM aparatur yang berdaya saing digital dalam pengelolaan pemerintahan;
- i. Kualitas data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan;
- j. Masih banyak badan publik di lingkup Provinsi Jawa Tengah yang belum terbuka;
- k. Masih tingginya ancaman keamanan siber;
- l. Perlu adanya Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.
- m. Upaya Penguatan *Data Center* dalam berbagai aspek seperti sertifikasi, kualitas SDM pengelola, *power supply*, dsb sebagai aset yang memiliki tingkat *maintenance* tinggi, perlu didorong agar lebih optimal untuk masyarakat dan pemerintah.

2. Peluang

- a. Kualitas pelayanan publik Jawa Tengah berbasis elektronik yang lebih baik dan dibutuhkan oleh masyarakat semakin meningkat;
- b. Tuntutan jaman digital mengubah gaya hidup masyarakat berikut kesadaran tentang pentingnya data dan digitalisasi;
- c. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Pemerintahan Digital Jawa Tengah;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan kualitas pembangunan Pemerintahan Digital Jawa Tengah;
- e. Pemangku kepentingan mempunyai kesadaran mengenai pentingnya keamanan siber dalam pengelolaan teknologi informasi; Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
- f. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah berorientasi kepada layanan pemerintahan Digital karena tersedianya payung hukum yang semakin memudahkan untuk bekerjasama dalam menyongsong transformasi digital Jawa Tengah;
- g. Adanya *free* program yang membekali pengguna dengan *skill* dan sertifikasi khusus seperti : *Digital Talent*, *Beasiswa*, *Short Course* dan platform digital lain yang berperan sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas SDM serta dapat dilaksanakan dan dikerjakan di mana saja (*by online*).

Tabel 2. 8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	Belum optimalnya pengelolaan TIK dan E-Government	1. Belum optimalnya keterhubungan antara perangkat daerah dengan jaringan intra pemerintah daerah 2. Belum optimalnya keterhubungan aplikasi SPBE dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan ketentuan regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
2.	Belum efektifnya penerapan sistem keamanan informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan persandian keamanan informasi	1. Belum seluruhnya perangkat daerah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian 2. Belum optimalnya fasilitasi perangkat daerah yang menggunakan jaringan komunikasi sandi
3.	Belum efektifnya layanan data statistik sektoral dan geospasial	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial yang terintegrasi	1. Belum Optimalnya pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interpretabilitas data, kode referensi dan / data induk 2. Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral oleh pengguna layanan data 3. Belum optimalnya penyelenggaraan/proses bisnis statistik sektoral sesuai standar

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			4. Masuk kandidat pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik
		Belum optimalnya penyelenggaraa n badan publik yang terbuka (informatif)	1. Belum optimalnya komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan dan terdaftar di diskomdigi 2. Belum optimalnya penyelenggaraan permohonan informasi pulik yang sesuai peraturan perundangan
4	Belum pengelolaan penyebaran pemerataan publik	efektifnya kualitas dan informasi Belum optimalnya pengedukasian masyarakat agar lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi digital	1. Masih sedikit ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek / pelatihan 2. Belum optimalnya penyelenggaraan aktifitas relasi media kepada media 3. Belum optimalnya sasaran khalayak yang terpapar informasi komunikasi publik 4. Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik milik Pemda 5. Belum optimalnya pengelolaan konten informasi publik

2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2. 9 Perumusan Isu Strategis Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis pada urusan Komdigi, statistik dan persandian	1. Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi 2. Belum efektifnya penerapan sistem keamanan informasi 3. Belum efektifnya layanan data statistik sektoral dan geospasial 4. Belum efektifnya pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik	1. Belum optimalnya tata kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	1. Infrastruktur 2. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	1. Isu ekonomi : Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas 2. Isu tata kelola pemerintahan : memberikan pelayanan yang berkualitas		1. Pemerintahan Digital
		-				2. Perkembangan TIK
		-				3. Pengelolaan Keluhan dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengaduan Masyarakat
		-				4. Keamanan Informasi
		-				5. Pencegahan hoaks, mis informasi dan disinformasi
		-				6. Pengelolaan Big Data

Penjelasan isu strategis:

1. Dalam rangka mewujudkan pemerintah digital untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan Pemerintah Digital Jawa Tengah, pemanfaatan instrumen evaluasi baru SPBE dalam konteks pembinaan pemerintah digital, bukan hanya sekedar alat ukur, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran, refleksi, dan persiapan strategis bagi instansi pusat dan pemerintah daerah. Dengan indikator reformulasi Indeks Pemerintah Digital Jawa Tengah mencerminkan posisi nyata kematangan digital suatu instansi. Adapun Indeks Pemerintah Digital dihitung berdasarkan penjumlahan dari bobot pada 9 (Sembilan) aspek dan 35 (tiga puluh lima) indikator pada konsep model instrument evaluasi kinerja pemerintah digital. Indeks ini mengukur penguatan tata Kelola pemerintah digital, penguatan teknologipemerintah digital, pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.
2. Perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi) meliputi peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur digital di seluruh Jawa Tengah, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital yang kompeten, serta transformasi digital dan pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Isu-isu ini penting untuk mewujudkan transformasi digital yang merata, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan, antara lain Internet, Cloud Computing, Internet of Things (IoT), Kecerdasan Buatan (AI), Data Center, Blockchain, Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR), serta perangkat keras dan aplikasi seperti media sosial dan fintech. Teknologi ini memungkinkan akses informasi yang cepat, komunikasi global, otomatisasi tugas, analisis data besar, dan menciptakan pengalaman digital yang imersif, mengubah cara hidup dan bekerja. Sedangkan untuk pengelolaan Data Center tidak hanya sebagai tempat penyimpanan data, tetapi ke depan perlu dikembangkan lagi pemanfaatannya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
3. Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 pasal 18 menegaskan bahwa pengelola pengaduan di Daerah adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital. Dalam Permendagri dimaksud diatur pula pembagian peran, tugas dan tanggung jawab kelembagaan pengelola pengaduan. Terdapat tiga alasan

penting peran pengelolaan pengaduan merupakan ruh dalam pelayanan publik: (a).pemenuhan hak masyarakat akan pelayanan publik yang optimal. (b).pengaduan masyarakat merupakan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan. (c). sarana atau media pemerintah dalam memberikan jawaban atas keluhan masyarakat.

4. Mengantisipasi kejadian risiko serangan keamanan informasi ke Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah, ke depan perlu ada upaya peningkatan kapasitas SDM Keamanan informasi untuk penanganan insiden dan monitoring serangan siber, yang meliputi : Application Security, Cloud Security, Cryptography, Infrastructure Security, Incident Response, dan Vulnerability Management serta tantangan menjaga privasi data pribadi baik di level individu pegawai maupun data instansi yang dikecualikan.
5. Mempertimbangan risiko operasional di lingkungan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah terutama penyebaran hoaks yang semakin massif, melalui monitoring dan counter berita hoax, dan penyusunan rekomendasi dari hasil monitoring dan analisis berita atas informasi dengan sentiment negatif, serta pelatihan monitoring dan analisis berita ke Kab/Kota di Jawa Tengah. Mengenal misinformasi dan disinformasi sangat penting untuk menjaga keamanan informasi karena membantu kita lebih waspada terhadap informasi yang salah atau menyesatkan, mencegah penyebarannya, serta melindungi data pribadi dan reputasi. Pemahaman ini juga memperkuat ketahanan digital, menjaga kepercayaan publik, dan mendorong masyarakat agar lebih kritis dan bijak dalam mengelola informasi di era digital. Terkait dengan salah satu Tusi utama Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah yaitu peliputan dan publikasi Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Terkait *big data* bagi Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah mencakup infrastruktur digital yang belum merata dan biayatinggi, keterbatasan SDM yang terampil dalam analisis *big data*, isu privasi dan keamanan data seperti potensi kebocoran dan pelanggaran keamanan siber, serta tata kelola data yang perlu diperkuat melalui kolaborasi dan regulasi yang mendukung interoperabilitas data antar instansi pemerintah dan sektor swasta. Ke depan perlu adanya integrasi *Big Data* ke dalam proses pengambilan kebijakan berbasis data oleh pimpinan daerah. Hal tersebut juga mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah dan memerlukan dukungan kolaborasi *pentahelix* salah satunya yaitu pemanfaatan *Big Data* seperti *mobile positioning* data.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komdigi Jawa Tengah

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan salah satu sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, ditetapkan sebagai tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan perumusan fokus program dan kegiatan strategis. Tujuan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah yaitu Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pemanfaatan Insfrastruktur TIK;**
- 2) Meningkatkan Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan sistematis.**

Berdasarkan tabel penjabaran 136 Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dinas Komdigi Mendukung Indeks Reformasi Birokrasi dengan aktivitas riil perangkat daerah :

1. Pengembangan aplikasi layanan terintegrasi
Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ;
2. Penyusunan kebijakan atau regulasi berupa peraturan gubernur tentang integrasi aplikasi di Jawa Tengah ke dalam aplikasi "Jateng Ngopeni". Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Pelaksanaan integrasi aplikasi yang dimulai dari pemetaan aplikasi, pembelian lisensi, metode, arsitektur layanan, tenaga ahli/tim ahli, help desk, rapat koordinasi. Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;

4. Pemetaan dan penguatan infrastruktur PPID pusat (dinas komdigi) Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
5. Pemetaan dan penguatan SDM PPID pusat (dinas komdigi) Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
6. Pelatihan SDM PPID untuk seluruh perangkat daerah Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
7. Penyusunan Pergub satuan tugas pengamanan data digital
8. Implementasi Pencegahan dan Pengamanan Informasi dari ancaman insiden siber oleh Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) di Pemprov Jateng Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Penyelenggaraan Persandian untuk Kemananan Informasi;
9. Memberikan fasilitasi pencegahan dan keamanan informasi kepada Kabupaten/Kota di Jateng Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam Program Penyelenggaraan Persandian untuk Kemananan Informasi;
10. Penyelenggaraan Forum Media dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Forum Media dan Komunikasi Publik;

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi, dengan aktivitas riil perangkat daerah :

1. Penyediaan jaringan internet di desa, Pemasangan jaringan FO, Wi-fi gratis berkapasitas 20 Mbps, bersifat stimulan selama 1 tahun anggaran dan, pelatihan penggunaan secara positif (usaha/bisnis).
Program prioritas Bapak Gubernur dengan rincian aktivitas riil sudah masuk atau terakomodir dalam program aplikasi informatika

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dengan rincian 2 tujuan dan 10 indikator sasaran strategis Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Angka	3,07	4,50	-	-	-	-	-	-	-
			Indeks Pemerintahan Digital	Angka	-	2	2,1	2,3	2.3	2.7	3	3,1	3,1
		Meningkatkanya Pemanfaatan Insfrastruktur TIK	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital	Angka	-	-	3,95	4,03	4,08	4,15	4,23	4,27	4,27
		Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data terstruktur dan sistematis	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Angka	-	-	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3

Tabel 3. 2 *Tujuan, Sasaran serta Indikator yang Berkaitan Dengan Kesekretariatan*

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	69,02	69,2	69,23	69,25	69,5	70	70,01	70,02	70,02
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah.	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Angka	2,738	3,01	3,02	2,8	2,9	3	3,01	3,02	3,02
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	78	79	79,5	80	80,05	81	81,5	82	82

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional, dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik atau fokus, konkrit dan operasional. Strategi dan kebijakan Diskomdigi yang disusun merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Diskomdigi dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan	1. Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi TIK.	1. Melakukan penguatan pengelolaan layanan dan tata kelola infrastruktur TIK. 2. Mengoptimalkan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi. 3. Meningkatkan aplikasi berbagi pakai dan proses bisnis pemerintahan. 4. Mengimplemen tasikan inisiasi Smart Province.	1. Meningkatkan Ketersediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Meningkatkan SDM Pengelola Layanan Infrastruktur TIK 3. Meningkatkan Aplikasi berbagi pakai dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola 4. Mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas 5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran keamanan informasi kepada seluruh pihak 6. Mengimplementasikan keamanan informasi secara konsisten di seluruh unit kerja di Pem. Prov Jateng

			7. Mengurangi resiko keamanan informasi melalui penerapan pedoman teknis yang lebih baik
	2. Meningkatnya pelayanan tata kelola data terstruktur dan sistematis	1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral Jawa Tengah 2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan layanan data statistik dan data geospasial 3. Meningkatkan ketercapaian penyelenggaraan Big Data 4. Meningkatkan tata kelola dan layanan keamanan informasi serta jaring komunikasi sandi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital. 5. Mengoptimalkan pengelolaan informasi publik. 6. Meningkatkan kualitas konten informasi publik.	1. Meningkatkan Kualitas Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi 2. Meningkatkan kualitas SDM pengelola data Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi 3. Meningkatkan Nilai Keterbukaan Informasi Publik 4. Meningkatkan Jumlah Badan Publik yang Terbuka (Informatif) 5. Meningkatkan Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik 6. Meningkatkan kualitas konten informasi publik yang disebarluaskan baik melalui media internal maupun eksternal
2. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di dinas komunikasi dan informasi digital	1. meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital.	1. meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan.	1. Meningkatkan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berbasis Risiko 2. Meningkatkan kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2. Meningkatnya Kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi	1. Meningkatkan pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan.

	Informasi Digital.	Digital.	2. Meningkatkan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan 3. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 4. Meningkatkan kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
--	--------------------	----------	--

Tabel 3. 4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengetahuan dasar dan kapasitas pembangunan Digital	Peningkatan akses dan Kualitas layanan publik	Akselerasi pembangunan digital prioritas	Pembangunan digital terintegrasi dan berkelanjutan	Penyelesaian dan konsolidasi kesinambungan pembangunan digital

Penjelasan Terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pembangunan Digital

Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan

kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi “Jawa Tengah sebagai Provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045”.

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik

Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan. Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat Provinsi Jawa Tengah akan semakin mudah mengakses layanan publik yang di waktu bersamaan juga terus dilakukan peningkatan kualitasnya, mencakup layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan sosial lainnya, sehingga sistem layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan merata.

3. Akselerasi Pembangunan Digital Prioritas

Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah di akhir tahun perencanaan. Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan. Sebagai

periode tengah waktu, tahap ini menjadi tahap krusial karena sudah terlihat proyeksi keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Pelaksanaan serta capaian pembangunan yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan sesuai target yang telah ditetapkan akan terus dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian yang lebih mendalam. Namun, terhadap pelaksanaan maupun capaian pembangunan yang teridentifikasi berjalan lambat atau tidak sesuai target, dilakukan akselerasi untuk memastikan bahwa target pembangunan tersebut dapat kembali di jalur yang tepat sehingga akan tercapai sesuai target di akhir tahun perencanaan. Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi " Jawa Tengah sebagai Provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia emas 2045".

4. Pembangunan Digital Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan

berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan keseluruhan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kestinambungan Pembangunan Digital

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target tujuan dan sasaran Dinas Komunkasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah tercapai sebagai indikator keberhasilan guna mendukung terwujudnya visi "Jawa Tengah sebagai Provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia emas 2045". Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), yang menekankan pada tema "Akselerasi Pembangunan" guna mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kestinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dipandang sebagai pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah menuju "Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045". Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029, Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periodeperiode selanjutnya. Pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3. 5 Manajemen Risiko Strategis Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan *	Indeks Pemerintah Digital	Rendahnya tingkat kematangan indeks Pemdi		20 -Keterlambatan pemenuhan dokumen Pemdi - Ketidak sinkronan dengan SPBE yang sedang berjalan - lemahnya kolaborasi dengan listas OPD - terbatasnya SDM - rendahnya partisipasi pulik - rendahnya keamanan informasi dan privasi - data tidak tersandar	Skor nilai pemdi turun	Menyusun, melaksanakan dan monitoring evaluasi arsitektur dan peta rencana Pemerintah Digital	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Sasaran								
Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK **	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital	Transformasi digital gagal dilakukan		16 -Integrasi yang rumit dikarenakan tidak ada standar yang seragam dapat menyebabkan setiap lembaga pemerintahan membangun sistemnya sendiri, sehingga mempersulit integrasi data dan layanan antar-instansi -Keamanan data yang rentan	-Pengambilan keputusan yang tidak akurat -Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola layanan publik	Mensinergikan pemanfaatan infrastruktur TIK dengan pada stakeholder, baik dari OPD maupun pemerintah Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis **	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Menurunnya nilai keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah		16 Masih adanya ego sektoral dalam pemenuhan instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Menurunnya kategori keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	Meningkatkan implementasi regulasi tata kelola data	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital *	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Rendahnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		16 Standar pelayanan tidak dilaksanakan dengan optimal	Penurunan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi atas implementasi RB untuk dilaksanakan oleh semua unit kerja	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Sasaran								
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Keterlambatan Respon dan Tanggapan terhadap permintaan Pelayanan Publik		12 -SOP tidak dijalankan dengan baik *-Kurangnya sosialisasi layanan Diskomidigi	Waktu pelayanan menjadi lebih lama	menyusun dan berkomitmrn terhadap pelaksanaan standar Operasi Prosedut (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah tidak berkualitas dan hanya sebatas pemenuhan dokumen		12 Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam menerapkan pengelolaan risiko	Perencanaan Kegiatan Perangkat daerah kurang baik karena tidak menerapkan pengelolaan risiko	Melaksanakan FGD dan brainstorming saat penyusunan Risk Register	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jawa Tengah 2025-2029 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai 2 tujuan dan 4 indikator strategis Perangkat Daerah, Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 4 (empat) urusan, 5 (lima) program, 16 kegiatan dan 81 sub kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Dinas Komunikasi Informatika dan digital Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas dan fungsi urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian. Diskomdigi melaksanakan 4 urusan dan 5 Program :

1. Urusan Kominfo – Program Pengelolaan aplikasi informatika, Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
2. Urusan Statistik – Program penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Urusan Persandian – Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
4. Urusan penunjang – Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Pada Urusan Kominfo, Diskomdigi melaksanakan 16 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan :

1. Pada Urusan Kominfo mencakup beberapa Kegiatan dan sub kegiatan :
 - a. Kegiatan Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah provinsi, mencakup sub kegiatan : keterhubungan jaringan intra pemerintah daerah Kab/kota ke jaringan intra pemerintah daerah

- Provinsi; penyediaan akses internet; penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah provinsi; koordinasi pembangunan dan atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE; koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE; koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan provinsi cerdas; penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah;
- b. Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, mencakup sub kegiatan: Relasi media; pengelolaan media komunikasi publik; penguatan kapasitas SDM komunikasi publik; kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat; dukungan administratif, keuangan dan tatakelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik; pelayanan informasi publik; penyusunan strategi komunikasi publik; monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik
2. Pada urusan Persandian mencakup beberapa kegiatan dan sub kegiatan :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, mencakup Sub Kegiatan: Penetapan kebijakan tatakelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah; pengelolaan sumber daya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan; penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah; pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik.
 - b. Kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi, mencakup sub kegiatan : Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah.
 3. Pada Urusan Statistik mencakup 1 Kegiatan dan beberapa sub kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial dilingkup daerah provinsi, mencakup sub kegiatan: pemenuhan prinsip SDI; peningkatan kualitas statistik sektoral; pelaksanaan probis statistik sektoral sesuai standar.
 4. Pada Urusan Penunjang mencakup beberapa kegiatan dan sub kegiatan :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mencakup Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD; pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, mencakup Sub Kegiatan : penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD; pengamanan barang milik daerah SKPD; rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD; Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, mencakup Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya; Pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian; koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian; Monitoring , evaluasi , dan penilaian kinerja pegawai; pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, mencakup Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik atau/ penerangan bangunan kantor ; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan peralatan rumah tangga; penyediaan bahan logistic kantor; penyediaan barang cetakan dan pengandaan; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan; fasilitasi kunjungan tamu; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD; dan dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, mencakup Sub Kegiatan : meliputi pengaddan kendaraan dinas operasional atau lapangan; pengadaan mebel; pengadaan asset tak berwujud; pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya; pengadaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya; pengadaan sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mencakup sub kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat;

penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mencakup sub kegiatan: penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar; pemeliharaan mebel; pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; pemeliharaan aset tak berwujud; pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; pemeliharaan atau rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya; pemeliharaan atau rehabilitasi sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- h. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mencakup sub kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; evaluasi kinerja perangkat daerah; pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah; penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
Menin gkatka n Kapabi litas Teknol ogi Pemer intaha n *										20.65 5.954 .704		20.81 4.304 .436		19.31 9.020 .900		18.88 6.533 .412		24.59 3.906 .281	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
						Indeks Pemerint ahan Digital *	Angka	N/A	2, 1		2, 3		2, 7		3		3, 1		Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
	Mening katnya Pemanf aatan Infrastru ktur									12.23 0.029 .954		12.34 8.621 .436		10.80 8.181 .900		10.16 2.859 .660		14.85 1.791 .436	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
	Teknolo gi Informa si dan Komuni kasi TIK **																			
						Tingkat Kematang an Pemanfaa tan Teknologi Digital **	Angka	N/A	4, 03	12.23 0.029 .954	4, 0 8	12.34 8.621 .436	4, 1 5	10.80 8.181 .900	4, 2 3	10.16 2.859 .660	4, 2 4	14.85 1.791 .436	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
			PROGRAM PENGELOL AAN APLIKASI INFORMATI KA ***							4.492 .547. 558		4.537 .472. 000		4.583 .747. 422		4.811 .988. 000		5.922 .588. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Infrastruk tur Teknologi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Meningka tnya layanan infrastruk tur TIK				Tingkat Pemenuh an Layanan Digital ***	%	N/A	25	4.492 .547. 558	4 0	4.537 .472. 000	6 0	4.583 .747. 422	8 0	4.811 .988. 000	1 0 0	5.922 .588. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Infrastruk tur Teknologi Digital	
				Pengelola an E- governme nt di Lingkup Pemerint ah Daerah Provinsi ****						4.492 .547. 558		4.537 .472. 000		4.583 .747. 422		4.811 .988. 000		5.922 .588. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Infrastruk tur Teknologi Digital	
		Meningka tnya integrasi jaringan				Jumlah Kabupate n/Kota yang	Kabup aten/K ota	N/A	35	947.1 53.55 8	3 5	956.6 25.00 0	3 5	966.1 91.00 0	3 5	1.014 .500. 000	3 5	1.248 .646. 000	Kelompok Kerja Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		intra pemerint ah daerah				memanfa atkan layanan jaringan Pemerint ah Daerah Provinsi ****													an Infrastruk tur Digital	
					Keterhub ungan Jaringan Intra Pemerint ah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerint ah Daerah Provinsi					947.1 53.55 8		956.6 25.00 0		966.1 91.00 0		1.014 .500. 000		1.248 .646. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Infrastruk tur Teknologi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)

		Terlaksan anya Keterhub ungan Jaringan Intra Pemerint ah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerint ah Daerah Provinsi				Jumlah Kab/Kota yang terhubun g dengan Jaringan Intra Pemerint ah Daerah Provinsi *****	Kabup aten/K ota	N/A	35	947.1 53.55 8	3 5	956.6 25.00 0	3 5	966.1 91.00 0	3 5	1.014 .500. 000	3 5	1.248 .646. 000	Kelompok Kerja Pengelola an Infrastruk tur Digital	JAWA TENGAH
		Terpenuhi nya layanan				Jumlah perangkat daerah	Unit	N/A	25 0	2.740 .000.	5 0	2.767 .400.	7 5 0	2.795 .974.	7 5 0	2.934 .827.	7 5 0	3.612 .180.	Kelompok Kerja	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		internet bagi Perangkat daerah				yang layanan internetn ya terpenuhi *****				000		000		000		000		000	Strategi dan akselerasi Infrastruk tur Digital	
					Penyedia an Akses Internet *****					2.740 .000. 000		2.767 .400. 000		2.795 .974. 000		2.934 .827. 000		3.612 .180. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Infrastruk tur Teknologi Digital	
		Terlaksan anya Penyedia an Akses Internet untuk Perangkat Daerah				Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfa atkan akses	Perang kat Daera h	86	10 0	2.740 .000. 000	1 1 6	2.767 .400. 000	1 3 2	2.795 .974. 000	1 4 8	2.934 .827. 000	1 6 4	3.612 .180. 000	Kelompok Kerja Strategi dan akselerasi Infrastruk tur Digital	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE				internet yang disediakan oleh Dinas *****														
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang kondisi perangkat dan jaringannya terpetakan				Jumlah perangkat daerah yang terpetakan kondisi perangkat dan jaringannya *****	Unit	N/A	250	805.394.000	500	813.447.000	750	821.582.422	750	862.661.000	750	1.061.762.000	Kelompok Kerja Layanan infrastruktur digital	
					Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah					805.394.000		813.447.000		821.582.422		862.661.000		1.061.762.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Daerah Provinsi *****														Infrastruk tur Teknologi Digital	
		Terlaksan anya Penyelen ggaraan Jaringan Intra Pemerint ah Daerah Provinsi				Jumlah Perangkat Daerah di pemerint ah provinsi yang terhubun g dengan Jaringan Intra Pemerint ah Daerah Provinsi *****	Perang kat Daera h	98	10 7	805.3 94.00 0	1 0 9	813.4 47.00 0	1 1 1	821.5 82.42 2	1 1 3	862.6 61.00 0	1 1 5	1.061 .762. 000	Kelompok Kerja Layanan infrastruk tur digital	JAWA TENGAH
			PROGRAM PENGELOL AAN APLIKASI							2.532 .531. 960		2.557 .857. 000		2.583 .436. 000		2.712 .608. 000		3.338 .673. 000	Dinas Komunika si dan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
			INFORMATI KA ***																Digital - Bidang Aplikasi Pemerint ah Digital	
		Meningka tnya Pemanfaa tan Aplikasi Teknologi Pemerint ahan Digital				Tingkat Pembang unan/Pen gembang an Aplikasi ***	%	N/A	12	2.532 .531. 960	2 2	2.557 .857. 000	3 5	2.583 .436. 000	4 7	2.712 .608. 000	5 9	3.338 .673. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerint ah Digital	
				Pengelola an E- governme nt di Lingkup Pemerint ah Daerah Provinsi ****						2.532 .531. 960		2.557 .857. 000		2.583 .436. 000		2.712 .608. 000		3.338 .673. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerint ah Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Meningka tnya aplikasi Pemerint ah Daerah yang terintegra si				Jumlah aplikasi pemerint ah daerah yang terintegra si ****	Aplika si	N/A	10	2.232 .531. 960	1 0	2.254 .857. 000	1 0	2.277 .406. 000	1 0	2.391 .276. 000	1 0	2.943 .179. 000	Pokja Pengemb angan Pemerint ah Digital	
					Koordinas i pembang unan dan/atau pengemb angan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana					2.232 .531. 960		2.254 .857. 000		2.277 .406. 000		2.391 .276. 000		2.943 .179. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerint ah Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					SPBE pemerint ah daerah, serta pemanfaa tan Aplikasi Umum SPBE *****															
		Meningka tnya jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikemban gkan sesuai dengan ketentua				Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikemban gkan sesuai dengan ketentua n atau regulasi	Aplika si	N/A	5	2.232 .531. 960	5	2.254 .857. 000	5	2.277 .406. 000	5	2.391 .276. 000	5	2.943 .179. 000	Pokja Pengemb angan Pemerint ah Digital	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerint ah Digital

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		n atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembang unan dan pengemb angan aplikasi SPBE				tentang standar teknis dan prosedur pembang unan dan pengemb angan aplikasi SPBE *****														
		Meningka tnya rekomen dasi pengemb angan aplikasi sesuai dengan Arsitektur SPBE				Jumlah rekomen dasi pengemb angan aplikasi sesuai Arsitektur SPBE *****	Rekom endasi	N/A	5	150.0 00.00 0	1 0	151.5 00.00 0	1 0	153.0 15.00 0	1 0	160.6 66.00 0	1 0	197.7 47.00 0	Pokja Tata Kelola Pemerint ah Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Koordinas i dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/ atau kolaboras i penyelen ggaraan SPBE *****					150.0 00.00 0		151.5 00.00 0		153.0 15.00 0		160.6 66.00 0		197.7 47.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerint ah Digital	
		Tersusun nya Jumlah Laporan Pelaksana an Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE				Jumlah laporan Pelaksana an Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaboras	Lapora n	N/A	3	150.0 00.00 0	4	151.5 00.00 0	4	153.0 15.00 0	4	160.6 66.00 0	4	197.7 47.00 0	Pokja Tata Kelola Pemerint ah Digital	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerint ah Digital

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		dan/atau Kolaboras i Penyelen ggaraan SPBE				i penyelen ggaraan SPBE *****														
		Meningka tnya entitas yang mendapat kan pemaham an tentang Provinsi Cerdas				Jumlah entitas yang mendapat kan pemaham an tentang Provinsi Cerdas *****	Orang	N/A	10	150.0 00.00 0	1 0	151.5 00.00 0	1 0	153.0 15.00 0	1 0	160.6 66.00 0	1 0	197.7 47.00 0	Pokja Ekosiste m Pemerint ah Digital	
					Koordinas i dan Fasilitasi Penyelen ggaraan Provinsi Cerdas					150.0 00.00 0		151.5 00.00 0		153.0 15.00 0		160.6 66.00 0		197.7 47.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					*****														Pemerint ah Digital	
		Tersusun nya Laporan Pelaksana an Koordinas i dan Fasilitasi Penyelen ggaraan Provinsi Cerdas				Jumlah laporan pelaksana an koordinas i dan fasilitasi penyelen ggaraan Provinsi Cerdas *****	Lapora n	N/A	4	150.0 00.00 0	4	151.5 00.00 0	4	153.0 15.00 0	4	160.6 66.00 0	4	197.7 47.00 0	Pokja Ekosiste m Pemerint ah Digital	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerint ah Digital
			PROGRAM PENGELOL AAN APLIKASI INFORMATI KA ***							3.680 .196. 000		3.680 .196. 000		2.030 .476. 042		954.1 84.22 4		3.680 .196. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rget	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Meningka tnya Pemanfaa tan Pusat Data Provinsi				Tingkat Pemanfaa tan Pusat Data Provinsi ***	%	N/A	65	3.680 .196. 000	6 8	3.680 .196. 000	7 0	2.030 .476. 042	7 2	954.1 84.22 4	7 5	3.680 .196. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
				Pengelola an E- governme nt di Lingkup Pemerint ah Daerah Provinsi *****						3.680 .196. 000		3.680 .196. 000		2.030 .476. 042		954.1 84.22 4		3.680 .196. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Terimple mentasik annya operasi governme nt cloud				Persentas e penyimpa nan yang termanfa atkan	%	N/A	70	3.680 .196. 000	7 2	3.680 .196. 000	7 4	2.030 .476. 042	7 6	954.1 84.22 4	7 8	3.680 .196. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rget	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		computin g				****													Pusat Data	
					Penyelen ggaraan pusat kendali Pemerint ah Daerah *****					3.680 .196. 000		3.680 .196. 000		2.030 .476. 042		954.1 84.22 4		3.680 .196. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Terlaksan anya penyelen ggaraan pusat kendali pemerint ah daerah				Jumlah laporan operasion alisasi pusat kendali *****	Lapora n	N/A	1	3.680 .196. 000	1	3.680 .196. 000	1	2.030 .476. 042	1	954.1 84.22 4	1	3.680 .196. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
			PROGRAM PENYELENG GARAAN PERSANDIA N UNTUK PENGAMA							1.524 .754. 436		1.573 .096. 436		1.610 .522. 436		1.684 .079. 436		1.910 .334. 436	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
			NAN INFORMASI ***																Persandia n dan Keamana n Siber	
		Meningka tnya Keamana n Siber dan Sandi				Tingkat Kematang an Keamana n Siber ***	Angka	N/A	3, 59	1.524 .754. 436	3, 6	1.573 .096. 436	3, 6 1	1.610 .522. 436	3, 6 2	1.684 .079. 436	3, 6 3	1.910 .334. 436	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Persandia n dan Keamana n Siber	
				Penyelen ggaraan Persandia n untuk Pengama nan Informasi Pemerint ah Daerah						889.3 34.43 6		931.3 22.43 6		962.3 31.43 6		1.003 .478. 436		1.072 .652. 436	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Persandia n dan Keamana n Siber	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
				Provinsi *****																
		Meningka tnya pemaham an perangkat daerah terkait implemen tasi kebijakan keamana n informasi dan persandia n				Jumlah perangkat daerah yang mendapat kan wawasan terkait implemen tasi kebijakan keamana n informasi dan persandia n *****	Unit	20	50	100.6 60.43 6	5 0	100.6 60.43 6	5 0	100.6 60.43 6	5 0	100.6 60.43 6	5 0	100.6 60.43 6	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	
					Penetapa n Kebijakan Tata					100.6 60.43 6		100.6 60.43 6		100.6 60.43 6		100.6 60.43 6		100.6 60.43 6	Dinas Komunika si dan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Kelola Keamana n Informasi dan Persandia n Pemerint ah Daerah *****													Digital - Bidang Persandia n dan Keamana n Siber		
		Ditetapka nnya Kebijakan Tata Kelola Keamana n Informasi dan Persandia n Pemerint ah				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamana n Informasi dan Persandia n Pemerint ah Daerah	Doku men	1	1	100.6 60.43 6	1	100.6 60.43 6	1	100.6 60.43 6	1	100.6 60.43 6	1	100.6 60.43 6	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Daerah				yang Ditetapka n baik berupa Peraturan Gubernur , Keputusa n Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunaka n sebagai panduan dalam menjalan kan penyelen														

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
						ggaraan persandia n. *****														
		Meningka tnya Kapasitas SDM Persandia n dan Keamana n Informasi				Jumlah SDM persandia n dan keamana n informasi yang ditingkatk an kapasitas nya *****	Orang	2	3	52.08 0.000	4	52.60 0.000	4	52.12 6.000	4	55.78 3.000	5	68.65 7.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan Sandi	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Pengelola an Sumber Daya Keamana n Informasi dan Persandia n Pemerint ah Daerah berdasark an Analisis Kebutuha n *****					52.08 0.000		52.60 0.000		52.12 6.000		55.78 3.000		68.65 7.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Persandia n dan Keamana n Siber	
		Terlaksan anya Pengelola an Sumber Daya				Jumlah Laporan Pengelola an Sumber Daya	Lapora n	1	4	52.08 0.000	4	52.60 0.000	4	52.12 6.000	4	55.78 3.000	4	68.65 7.000	Kelompok Kerja Tata Kelola Ruang Siber dan	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Keamana n Informasi dan Persandia n Pemerint ah Daerah berdasark an Analisis Kebutuha n				Keamana n Informasi dan Persandia n Pemerint ah Daerah berdasark an Analisis Kebutuha n *****													Sandi	
		Terseleng garanya layanan keamana n informasi dan persandia n di perangkat				Persentas e perangkat daerah yang menggun akan layanan keamana n	%	100	10 0	589.7 54.00 0	1 0 0	629.7 54.00 0	1 0 0	659.7 54.00 0	1 0 0	689.7 54.00 0	1 0 0	709.7 54.00 0	Kelompok Kerja Layanan Keamana n Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		daerah				informasi dan persandia n ****														
					Penyedia an Layanan Keamana n Informasi dan Persandia n Pemerint ah Daerah *****					589.7 54.00 0		629.7 54.00 0		659.7 54.00 0		689.7 54.00 0		709.7 54.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Persandia n dan Keamana n Siber	
		Tersedian ya Layanan Keamana n Informasi dan				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggun akan	Perang kat Daera h	20	50	589.7 54.00 0	5 0	629.7 54.00 0	5 0	659.7 54.00 0	5 0	689.7 54.00 0	5 0	709.7 54.00 0	Kelompok Kerja Layanan Keamana n Informasi	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Persandia n Pemerint ah Daerah				Layanan Keamana n Informasi dan Persandia n *****														
		Meningka tnya perangkat daerah yang menduku ng pemanfaa tan teknologi kemanan informasi pemerint ah daerah berbasis elektronik dan				Jumlah perangkat daerah yang menduku ng pemanfaa tan teknologi keamana n informasi pemerint ah daerah berbasis elektronik dan	Unit	20	50	146.8 40.00 0	5 0	148.3 08.00 0	5 0	149.7 91.00 0	5 0	157.2 81.00 0	5 0	193.5 81.00 0	Kelompok Kerja Layanan Keamana n Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		nonelekt ronik				nonelekt ronik ****														
					Pelaksana an Keamana n Informasi Pemerint ahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik *****					146.8 40.00 0		148.3 08.00 0		149.7 91.00 0		157.2 81.00 0		193.5 81.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Persandia n dan Keamana n Siber	
		Terlaksan anya Keamana n Informasi Pemerint				Jumlah Laporan Pelaksana an Keamana n	Lapora n	50	50	146.8 40.00 0	5 0	148.3 08.00 0	5 0	149.7 91.00 0	5 0	157.2 81.00 0	5 0	193.5 81.00 0	Kelompok Kerja Layanan Keamana n	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		ahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				Informasi Pemerint ahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik *****													Informasi	
				Penetapa n Pola Hubunga n Komunika si Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi *****						635.4 20.00 0		641.7 74.00 0		648.1 91.00 0		680.6 01.00 0		837.6 82.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Persandia n dan Keamana n Siber	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Meningka tnya perangkat daerah yang menggun akan jaring komunika si sandi pemerint ah daerah Provinsi				Jumlah Perangkat Daerah yang menggun akan Jaring Komunika si Sandi *****	Unit	50	50	635.4 20.00 0	5 0	641.7 74.00 0	5 0	648.1 91.00 0	5 0	680.6 01.00 0	5 0	837.6 82.00 0	Kelompok Kerja Pengama nan Sistem Komunika si Ruang Digital	
					Operasio nalisasi Layanan Keamana n Informasi dan Persandia n Pemerint ah					635.4 20.00 0		641.7 74.00 0		648.1 91.00 0		680.6 01.00 0		837.6 82.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Persandia n dan Keamana n Siber	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Daerah *****															
		Terlaksan anya Operasio nalisasi Layanan Keamana n Informasi dan Persandia n Pemerint ah Daerah				Jumlah Operasio nalisasi Layanan Keamana n Informasi dan Persandia n Pemerint ah Daerah berdasark an pemetaan pola hubungan komunika si sandi	Perang kat Daera h	50	50	635.4 20.00 0	5 0	641.7 74.00 0	5 0	648.1 91.00 0	5 0	680.6 01.00 0	5 0	837.6 82.00 0	Kelompok Kerja Pengama nan Sistem Komunika si Ruang Digital	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Persandia n dan Keamana n Siber

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
						pemerintah Daerah. *****														
	Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis **									8.425.924.750		8.465.683.000		8.510.839.000		8.723.673.752		9.742.114.845	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
						Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi **	Angka	N/A	2,6	8.425.924.750	2,7	8.465.683.000	2,8	8.510.839.000	2,9	8.723.673.752	3	9.742.114.845	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
			PROGRAM PENGELOL AAN INFORMASI DAN KOMUNIKA SI PUBLIK ***							7.894 .813. 780		7.929 .261. 000		7.969 .054. 000		8.154 .801. 752		9.041 .945. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Komunika si Publik dan Media	
		Meningka tnya Kualitas Informasi Publik				Nilai Survey Kepuasan Komunika si Publik ***	Angka	85	85	7.894 .813. 780	8 6	7.929 .261. 000	8 7	7.969 .054. 000	8 8	8.154 .801. 752	8 9	9.041 .945. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Komunika si Publik dan Media	
				Pengelola an Informasi dan						7.894 .813. 780		7.929 .261. 000		7.969 .054. 000		8.154 .801. 752		9.041 .945. 000	Dinas Komunika si dan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
				Komunika si Publik Pemerint ah Daerah Provinsi *****														Digital - Bidang Komunika si Publik dan Media		
		Meningka tnya Konten Informasi Publik yang disebarlu askan				Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarlu askan *****	Konte n	170	19 0	1.300 .000. 000	2 0 0	1.313 .000. 000	2 1 0	1.326 .130. 000	2 2 0	1.392 .433. 000	2 3 0	1.713 .807. 000	Kelompok Kerja Pengelola an Komunika si Publik dan Relasi Media	
					Relasi Media *****					600.0 00.00 0		606.0 00.00 0		612.0 60.00 0		642.6 63.00 0		790.9 88.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Komunika	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
																			si Publik dan Media	
		Terlaksan anya Relasi Media				Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuh i kriteria sebagai berikut: 1. terverifik asi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam	Lapora n	10	4	600.0 00.00 0	6	606.0 00.00 0	8	612.0 60.00 0	1 0	642.6 63.00 0	1 2	790.9 88.00 0	Kelompok Kerja Pengelola an Komunika si Publik dan Relasi Media	Bidang Komunika si Publik dan Media

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
						kegiatan relasi media *****														
					Pengelola an Media Komunika si Publik *****					700.0 00.00 0		707.0 00.00 0		714.0 70.00 0		749.7 70.00 0		922.8 19.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Komunika si Publik dan Media	
		Terlaksan anya Pengelola an Media Komunika si Publik				Jumlah media komunika si publik milik pemerint ah daerah	Media	20	4	700.0 00.00 0	6	707.0 00.00 0	8	714.0 70.00 0	1 0	749.7 70.00 0	1 2	922.8 19.00 0	Kelompok Kerja Pengelola an Komunika si Publik	Bidang Komunika si Publik dan Media

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp	T a r g e t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
						yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis *****													dan Relasi Media	
		Meningkatnya Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi				Persentase Komunitas Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi *****	%	60	40	4.644.813.780	50	4.646.761.000	60	4.648.729.000	68	4.658.666.000	70	4.706.825.000	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraan dan Komunikasi	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rget	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Penguata n Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunika si Publik *****					194.8 13.78 0		196.7 61.00 0		198.7 29.00 0		208.6 66.00 0		256.8 25.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Komunika si Publik dan Media	
		Meningka tnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunika si Publik				Jumlah ASN bidang komunika si publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/p elatihan *****	Orang	20	20	194.8 13.78 0	2 5	196.7 61.00 0	3 0	198.7 29.00 0	3 5	208.6 66.00 0	3 5	256.8 25.00 0	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraa n dan Kehumas an	Bidang Komunika si Publik dan Media
					Kemitraa n Komunika					4.450 .000.		4.450 .000.		4.450 .000.		4.450 .000.		4.450 .000.	Dinas Komunika si dan	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					si dengan Komunita s Informasi Masyarak at *****					000		000		000		000		000	Informasi Digital - Bidang Komunika si Publik dan Media	
		Terlaksan anya Kemitraa n dengan Pemangk u Kepenting an				Jumlah Komunita s Informasi yang aktif mendise minasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo *****	Komu nitas	40	20	4.450 .000. 000	2 5	4.450 .000. 000	3 0	4.450 .000. 000	3 3	4.450 .000. 000	3 5	4.450 .000. 000	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraa n dan Kehumas an	Bidang Komunika si Publik dan Media
		Meningka tnya Layanan Permoho				Persentas e Layanan Permoho nan	%	82	84	650.0 00.00 0	8 5	656.5 00.00 0	8 6	668.0 65.00 0	8 7	711.2 67.75 2	8 8	907.5 06.00 0	Kelompok Kerja Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		nan Informasi yang Diselesaik an				Informasi yang Diselesaik an ****													an Informasi dan Dokumen tasi	
					Dukungan Administratif, Keuangan , dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesa ian Sengketa Informasi Publik *****					150.0 00.00 0		151.5 00.00 0		153.0 15.00 0		160.6 65.75 2		197.7 47.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Komunika si Publik dan Media	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksan anya Dukungan Administ ratif, Keuangan , dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesa ian Sengketa Informasi Publik				Jumlah laporan Dukungan Administ ratif, Keuangan , dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaik an kepada Kementer ian Komunika si dan Informati ka *****	Lapora n	50	55	150.0 00.00 0	5 7	151.5 00.00 0	5 9	153.0 15.00 0	6 1	160.6 65.75 2	6 3	197.7 47.00 0	Kelompok Kerja Pengelola an Informasi dan Dokumen tasi	Bidang Komunika si Publik dan Media

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Pelayana n Informasi Publik *****					500.0 00.00 0		505.0 00.00 0		515.0 50.00 0		550.6 02.00 0		709.7 59.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Komunika si Publik dan Media	
		Tersedian ya Pelayana n Informasi Publik				Jumlah permoho nan Informasi Publik yang diselesaik an sesuai peraturan perundan gan *****	Permo honan	70	76	500.0 00.00 0	7 7	505.0 00.00 0	7 8	515.0 50.00 0	7 9	550.6 02.00 0	8 0	709.7 59.00 0	Kelompok Kerja Pengelola an Informasi dan Dokumen tasi	Bidang Komunika si Publik dan Media

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Tersusun nya Rekomen dasi terhadap isu publik sebagai strategi komunika si dalam agenda prioritas pemerint ah daerah				Jumlah Rekomen dasi isu publik yang disusun *****	Rekom endasi	90	13 5	1.300 .000. 000	1 4 0	1.313 .000. 000	1 4 5	1.326 .130. 000	1 5 0	1.392 .435. 000	1 5 5	1.713 .807. 000	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraa n dan Kehumas an	
					Penyusun an Strategi Komunika si Publik *****					530.0 00.00 0		535.3 00.00 0		540.6 53.00 0		567.6 85.00 0		698.7 06.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Komunika si Publik dan Media	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksan anya Penyusun an Strategi Komunika si Publik				Jumlah Strategi Komunika si Publik yang disusun *****	Doku men	3	1	530.0 00.00 0	1	535.3 00.00 0	1	540.6 53.00 0	1	567.6 85.00 0	1	698.7 06.00 0	Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraa n dan Kehumas an	Bidang Komunika si Publik dan Media
					Monitorin g Informasi Kebijakan , Opini, dan Aspirasi Publik *****					770.0 00.00 0		777.7 00.00 0		785.4 77.00 0		824.7 50.00 0		1.015 .101. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Komunika si Publik dan Media	
		Terlaksan anya Monitorin g Informasi				Jumlah rekomen dasi komunika si	Rekom endasi	90	13 5	770.0 00.00 0	1 4 0	777.7 00.00 0	1 4 5	785.4 77.00 0	1 5 0	824.7 50.00 0	1 5 5	1.015 .101. 000	Kelompok Kerja Analisis Isu,	Bidang Komunika si Publik dan Media

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Kebijakan , Opini, dan Aspirasi Publik				terhadap isu publik yang berkempa ng dan usulan agenda komunika si prioritas Pemerint ah Daerah *****													Kemitraa n dan Kehumas an	
			PROGRAM PENYELENG GARAAN STATISTIK SEKTORAL ***							531.1 10.97 0		536.4 22.00 0		541.7 85.00 0		568.8 72.00 0		700.1 69.84 5	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Pengelola an Data dan Statistik	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Meningka tnya kematang an SDI tingkat provinsi				Indeks Satu Data Indonesia ***	Indeks	N/A	86	531.1 10.97 0	8 7	536.4 22.00 0	8 8	541.7 85.00 0	8 9	568.8 72.00 0	9 0	700.1 69.84 5	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Pengelola an Data dan Statistik	
				Penyelen ggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi *****						531.1 10.97 0		536.4 22.00 0		541.7 85.00 0		568.8 72.00 0		700.1 69.84 5	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Pengelola an Data dan Statistik	
		Tersedian ya data prioritas yang				Persentas e Data Prioritas yang	%	25	30	200.0 00.00 0	4 0	202.0 00.00 0	5 0	204.0 20.00 0	6 0	214.2 20.00 0	7 0	263.6 62.84 5	Kelompok Kerja Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		dapat diakses oleh publik				dapat diakses publik *****													an Integrasi Data	
					Pemenuh an Prinsip Satu Data Indonesia *****					200.0 00.00 0		202.0 00.00 0		204.0 20.00 0		214.2 20.00 0		263.6 62.84 5	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Pengelola an Data dan Statistik	
		Tersedian ya Statistik Sektoral yang memenuh i Prinsip Satu Data Indonesia				Persentas e kegiatan statistik sektoral yang telah memenuh i standar data,	%	20	40	200.0 00.00 0	6 0	202.0 00.00 0	8 0	204.0 20.00 0	1 0 0	214.2 20.00 0	1 0 0	263.6 62.84 5	Kelompok Kerja Pengelola an Integrasi Data	Bidang Pengelola an Data dan Statistik

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
						metadata , interoper abilitas data dan kode referensi dan/atau data induk *****														
		Tersedian ya data Geospasia l yang dapat diakses oleh publik				Jumlah data geospasia l yang dipublikas ikan ****	Data	N/A	30	131.1 10.97 0	4 0	132.4 22.00 0	5 0	133.7 45.00 0	6 0	140.4 32.00 0	7 0	172.8 45.00 0	Kelompok Kerja Pengelola an Data Geospasi al	
					Peningkat an kualitas statistik sektoral					131.1 10.97 0		132.4 22.00 0		133.7 45.00 0		140.4 32.00 0		172.8 45.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital -	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					*****														Bidang Pengelola an Data dan Statistik	
		Meningka tnya kualitas statistik sektoral				Persentas e kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. *****	%	20	40	131.1 10.97 0	6 0	132.4 22.00 0	8 0	133.7 45.00 0	1 0 0	140.4 32.00 0	1 0 0	172.8 45.00 0	Kelompok Kerja Pengelola an Data Geospasi al	Bidang Pengelola an Data dan Statistik
		Meningka tnya kualitas data sektoral perangkat				Jumlah perangkat daerah yang memiliki data	Unit	10	10	200.0 00.00 0	1 4	202.0 00.00 0	1 8	204.0 20.00 0	2 2	214.2 20.00 0	2 5	263.6 62.00 0	Kelompok Kerja Tata Kelola Data Statistik	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		daerah				sektoral sesuai prinsip SDI ****														
					Pelaksana an Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar *****					200.0 00.00 0		202.0 00.00 0		204.0 20.00 0		214.2 20.00 0		263.6 62.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - Bidang Pengelola an Data dan Statistik	
		Terlaksan anya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				Persentas e kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencan aan kegiatan	%	20	40	200.0 00.00 0	6 0	202.0 00.00 0	8 0	204.0 20.00 0	1 0 0	214.2 20.00 0	1 0 0	263.6 62.00 0	Kelompok Kerja Tata Kelola Data Statistik	Bidang Pengelolan Data dan Statistik

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
						statistik sektoral *****														
Menin gkatka n Kualita s Tata Kelola Perang kat Daera h Berint egritas dan Dinami s di Dinas Komu nikasi dan Inform asi										30.98 2.544 .296		31.34 0.579 .564		33.35 7.412 .100		36.42 3.721 .588		43.48 1.861 .719	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
Digital *																				
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Komunika si dan Informasi Digital *	Angka	69,02	69,23		69,25		69,5		70		70,02		Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komuni									30.582.544.296		30.936.579.564		32.938.412.100		35.989.721.588		42.964.861.719	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
	kasi dan Informa si Digital **																			
						Indeks Kepuasan Masyarak at Perangkat Daerah Dinas Komunika si dan Informasi Digital **	Angka	78	79 ,5	30.58 2.544 .296	8 0	30.93 6.579 .564	8 0, 5	32.93 8.412 .100	8 1	35.98 9.721 .588	8 1, 5	42.96 4.861 .719	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI ***							30.02 7.033 .319		29.86 6.579 .564		31.85 3.412 .100		34.90 4.721 .588		41.86 9.861 .719	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Meningka tnya kualitas pelayana n umum, kepegawa ian dan keuangan perangkat daerah di Dinas Komunika si dan Informasi Digital				Persentas e tingkat pelayaan umum, kepegawa ian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunika si dan Informasi Digital ***	%	78	79 ,5	30.02 7.033 .319	8 0	29.86 6.579 .564	8 0, 5	31.85 3.412 .100	8 1	34.90 4.721 .588	8 1, 5	41.86 9.861 .719	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
				Administr asi Keuangan Perangkat Daerah ****						20.41 2.000 .000		20.41 2.603 .486		20.41 3.206 .000		20.41 6.266 .300		20.43 1.098 .854	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Meningka tnya layanan				Jumlah jenis laporan	Doku men	100	7	20.41 2.000	7	20.41 2.603	7	20.41 3.206	7	20.41 6.266	7	20.43 1.098	SUB BAGIAN KEUANGA	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		administrasi keuangan perangkat daerah				administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *****				.000		.486		.000		.300		.854	N	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	107	115	20.000.000.000	113	20.000.000.000	111	20.000.000.000	109	20.000.000.000	107	20.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital
					Penyediaan					352.0		352.0		352.0		352.0		352.0	Dinas Komunika	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					00.00 0		00.00 0		00.00 0		00.00 0		00.00 0	si dan Informasi Digital	
		Tersedian ya Administra si Pelaksana an Tugas ASN				Jumlah Dokumen Hasil Penyedia an Administra si Pelaksana an Tugas ASN *****	Doku men	12	12	352.0 00.00 0	1 2	352.0 00.00 0	1 2	352.0 00.00 0	1 2	352.0 00.00 0	1 2	352.0 00.00 0	SUB BAGIAN KEUANGA N	Dinas Komunika si dan Informasi Digital
					Koordinas i dan Pelaksana an Akuntansi SKPD *****					20.00 0.000		20.20 1.162		20.40 2.000		21.42 2.100		26.36 6.285	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksan anya Koordinas i dan Pelaksana an Akuntansi SKPD				Jumlah Dokumen Hasil Koordinas i dan Pelaksana an Akuntansi SKPD *****	Doku men	4	4	20.00 0.000	4	20.20 1.162	4	20.40 2.000	4	21.42 2.100	4	26.36 6.285	SUB BAGIAN KEUANGA N	Dinas Komunika si dan Informasi Digital
					Pengelola an dan Penyiapa n Bahan Tanggapa n Pemeriks aan *****					21.00 0.000		21.21 1.220		21.42 2.100		22.49 3.205		27.68 4.599	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Tersedian ya Dokumen Bahan Tanggapa				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapa n	Doku men	1	1	21.00 0.000	1	21.21 1.220	1	21.42 2.100	1	22.49 3.205	1	27.68 4.599	SUB BAGIAN KEUANGA N	Dinas Komunika si dan Informasi Digital

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		n Pemeriks aan dan Tindak Lanjut Pemeriks aan				Pemeriks aan dan Tindak Lanjut Pemeriks aan *****														
					Koordinas i dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD *****					19.00 0.000		19.19 1.104		19.38 1.900		20.35 0.995		25.04 7.970	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Tersedian ya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinas i Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinas i Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semest eran SKPD *****	Lapora n	4	4	19.00 0.000	4	19.19 1.104	4	19.38 1.900	4	20.35 0.995	4	25.04 7.970	SUB BAGIAN KEUANGA N	Dinas Komunika si dan Informasi Digital
				Administr asi Barang Milik						218.5 00.00		218.7 00.00		239.1 00.00		270.0 80.00		299.4 00.00	Dinas Komunika si dan	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
				Daerah pada Perangkat Daerah ****						0		0		0		0		0	Informasi Digital	
		Meningka tnya layanan administr asi barang milik daerah pada perangkat daerah				Jumlah jenis dokumen administr asi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Doku men	6	6	218.5 00.00 0	6	218.7 00.00 0	6	239.1 00.00 0	6	270.0 80.00 0	6	299.4 00.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	
					Penyusun an Perencan aan Kebutuha n Barang Milik Daerah					9.000 .000		9.100 .000		9.500 .000		10.00 0.000		12.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					SKPD *****															
		Tersedian ya Rencana Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD				Jumlah Rencana Kebutuha n Barang Milik Daerah SKPD *****	Doku men	1	1	9.000 .000	1	9.100 .000	1	9.500 .000	1	10.00 0.000	1	12.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Pengama nan Barang Milik Daerah SKPD *****					200.0 00.00 0		200.0 00.00 0		220.0 00.00 0		250.0 00.00 0		275.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Pengama nan Barang Milik				Jumlah Dokumen Pengama nan Barang Milik	Doku men	1	1	200.0 00.00 0	1	200.0 00.00 0	1	220.0 00.00 0	1	250.0 00.00 0	1	275.0 00.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rget	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Daerah SKPD				Daerah SKPD *****														
					Rekonsilia si dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD *****					5.000 .000		5.000 .000		5.000 .000		5.250 .000		6.500 .000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Rekonsilia si dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah				Jumlah Laporan Rekonsilia si dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah	Lapora n	1	1	5.000 .000	1	5.000 .000	1	5.000 .000	1	5.250 .000	1	6.500 .000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		pada SKPD				pada SKPD *****														
					Penataus ahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****					4.500 .000		4.600 .000		4.600 .000		4.830 .000		5.900 .000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Penataus ahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah Laporan Penataus ahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Lapora n	4	4	4.500 .000	4	4.600 .000	4	4.600 .000	4	4.830 .000	4	5.900 .000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
				Administr asi Kepegaw						93.00 0.000		118.0 00.00		99.70 0.000		104.2 50.00		153.0 00.00	Dinas Komunika si dan	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
				aian Perangkat Daerah ****								0				0		0	Informasi Digital	
		Meningka tnya layanan administr asi kepegawa ian perangkat daerah				Persentas e layanan administr asi kepegawa ian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	20	93.00 0.000	4 0	118.0 00.00 0	6 0	99.70 0.000	8 0	104.2 50.00 0	1 0 0	153.0 00.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	
					Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka					0		20.00 0.000		0		0		20.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					pannya *****															
		Tersedian ya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pan				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pan *****	Paket	1	1	0	N /A	20.00 0.000	N /A	0	N /A	0	N /A	20.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Pendataa n dan Pengolah an Administ rasi Kepegaw aian *****					13.00 0.000		13.00 0.000		13.20 0.000		14.00 0.000		17.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Pendataa n dan				Jumlah Dokumen Pendataa n dan	Doku men	2	2	13.00 0.000	2	13.00 0.000	2	13.20 0.000	2	14.00 0.000	2	17.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN	KOTA SEMARAN G OP D

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Pengolah an Administ rasi Kepegaw aian				Pengolah an Administ rasi Kepegaw aian *****													KEPEGA WAIAN	Provinsi< br>SEMA RANG
WONOS OBO
					Koordinas i dan Pelaksana an Sistem Informasi Kepegaw aian *****					5.000 .000		5.000 .000		5.000 .000		5.000 .000		6.500 .000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Koordinas i dan Pelaksana an Sistem Informasi Kepegaw				Jumlah Dokumen Hasil Koordinas i dan Pelaksana an Sistem Informasi	Doku men	N/A	2	5.000 .000	2	5.000 .000	2	5.000 .000	2	5.000 .000	2	6.500 .000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	Koordinas i ke Kement erian/Lemb aga, DKI JAKARTA< br>KOTA SEMARAN G OP

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		aian				Kepegaw aian *****														D Provinsi< br>Tugas Belajar Pegawai, United States of America
					Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *****					20.00 0.000		25.00 0.000		25.50 0.000		26.50 0.000		33.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja				Jumlah Dokumen Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Doku men	2	2	20.00 0.000	2	25.00 0.000	2	25.50 0.000	2	26.50 0.000	2	33.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi< br>SEMA RANG >WONOS

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Pegawai				Pegawai *****														OBO
					Pendidika n dan Pelatihan Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi *****					50.00 0.000		50.00 0.000		51.00 0.000		53.50 0.000		70.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Pendidika n dan Pelatihan Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi				Jumlah Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan *****	Orang	10	10	50.00 0.000	1 0	50.00 0.000	1 0	51.00 0.000	1 0	53.50 0.000	1 0	70.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	Diklat Umum, Struktural dan Teknis, DAERAH ISTIMEW A YOGYAKA RTA O PD Provinsi<

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
																				br>SEMA RANG
Untuk Ujikom dan Diklat JF, DKI JAKARTA
					Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan g- Undangan *****					5.000 .000		5.000 .000		5.000 .000		5.250 .000		6.500 .000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbinga n Teknis Implemen tasi	Orang	N/A	N/ A	5.000 .000	5 0	5.000 .000	5 0	5.000 .000	5 0	5.250 .000	5 0	6.500 .000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		g- Undangan				Peraturan Perundan g- Undangan *****														
				Administrasi Umum Perangkat Daerah *****						476.8 00.00 0		481.5 95.79 9		486.3 83.68 0		510.7 02.86 8		628.5 72.22 4	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Meningka tnya kualitas layanan administr asi umum perangkat daerah				Persentas e layanan administr asi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	100	30	476.8 00.00 0	6 0	481.5 95.79 9	7 0	486.3 83.68 0	9 0	510.7 02.86 8	1 0 0	628.5 72.22 4	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	
					Penyedia an Kompone					28.30 0.000		28.58 4.644		28.86 8.830		30.31 2.272		37.30 8.293	Dinas Komunika si dan	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor *****													Informasi Digital		
		Tersedian ya Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n *****	Paket	2	2	28.30 0.000	2	28.58 4.644	2	28.86 8.830	2	30.31 2.272	2	37.30 8.293	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	Dinas Komunika si dan Informasi Digital
					Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor					90.20 0.000		91.10 7.240		92.01 3.020		96.61 3.672		118.9 11.94 3	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)

		Tersedian ya Peralatan dan Perlengka pan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n *****	Paket	10	20	90.20 0.000	2 2	91.10 7.240	2 4	92.01 3.020	2 8	96.61 3.672	3 0	118.9 11.94 3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Provinsi SEMA RANG
					Penyedia an Peralatan Rumah Tangga *****					25.00 0.000		25.25 1.452		25.50 2.500		26.77 7.625		32.95 7.856	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Tersedian ya Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	2	2	25.00 0.000	2	25.25 1.452	2	25.50 2.500	2	26.77 7.625	2	32.95 7.856	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
						Disediaka n *****														
					Penyedia an Bahan Logistik Kantor *****					30.00 0.000		30.30 1.743		30.60 3.000		32.13 3.150		39.54 9.427	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Tersedian ya Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n *****	Paket	6	6	30.00 0.000	6	30.30 1.743	6	30.60 3.000	6	32.13 3.150	6	39.54 9.427	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Penyedia an Barang Cetakan dan Penggand aan *****					28.00 0.000		28.28 1.627		28.56 2.800		29.99 0.940		36.91 2.798	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Tersedian ya Barang Cetakan dan Penggand aan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan yang Disediaka n *****	Paket	4	4	28.00 0.000	4	28.28 1.627	4	28.56 2.800	4	29.99 0.940	4	36.91 2.798	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- Undangan *****					300.0 00		303.0 17		306.0 30		321.3 32		395.4 94	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Tersedian ya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Doku men	5	5	300.0 00	5	303.0 17	5	306.0 30	5	321.3 32	5	395.4 94	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rget	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		g- Undangan				Perundan g- Undangan yang Disediaka n *****														
					Fasilitasi Kunjunga n Tamu *****					40.00 0.000		40.40 2.424		40.80 4.000		42.84 4.200		52.73 2.569	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Fasilitasi Kunjunga n Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu *****	Lapora n	12	12	40.00 0.000	1 2	40.40 2.424	1 2	40.80 4.000	1 2	42.84 4.200	1 2	52.73 2.569	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD					200.0 00.00 0		202.0 11.61 9		204.0 20.00 0		214.2 21.00 2		263.6 62.84 6	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)

		Terlaksan anya Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD *****	Lapora n	12	12	200.0 00.00 0	1 2	202.0 11.61 9	1 2	204.0 20.00 0	1 2	214.2 21.00 2	1 2	263.6 62.84 6	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					10.00 0.000		10.10 0.581		10.20 1.000		10.71 1.050		13.18 3.142	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Penataus ahaan Arsip				Jumlah Dokumen Penataus ahaan Arsip	Doku men	1	1	10.00 0.000	1	10.10 0.581	1	10.20 1.000	1	10.71 1.050	1	13.18 3.142	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Dinamis pada SKPD				Dinamis pada SKPD *****													WAIAN	
					Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					25.00 0.000		25.25 1.452		25.50 2.500		26.77 7.625		32.95 7.856	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektronik pada				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektronik pada	Doku men	2	2	25.00 0.000	2	25.25 1.452	2	25.50 2.500	2	26.77 7.625	2	32.95 7.856	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rget	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		SKPD				SKPD *****														
				Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah *****						1.341 .159. 558		282.5 39.29 8		222.0 00.00 0		222.0 00.00 0		222.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Tersedian ya barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ah daerah yang memiliki				Jumlah unit barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ah daerah yang	Unit	5	12	1.341 .159. 558	1 1	282.5 39.29 8	1 1	222.0 00.00 0	1 1	222.0 00.00 0	1 1	222.0 00.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		nilai aset				disediaka n ****														
					Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan *****					1.115 .159. 558		0		0		0		0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Tersedian ya Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan				Jumlah Unit Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan yang Disediaka n *****	Unit	N/A	1	1.115 .159. 558	N /A	0	N /A	0	N /A	0	N /A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Pengadaa n Mebel *****					80.00 0.000		80.00 0.000		80.00 0.000		80.00 0.000		80.00 0.000	Dinas Komunika si dan	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
																			Informasi Digital	
		Tersedian ya Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n *****	Paket	N/A	2	80.00 0.000	2	80.00 0.000	2	80.00 0.000	2	80.00 0.000	2	80.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Pengadaa n Aset Tak Berwujud *****					22.00 0.000		22.00 0.000		22.00 0.000		22.00 0.000		22.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Tersedian ya Aset Tak Berwujud				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediaka n *****	Unit	1	1	22.00 0.000	1	22.00 0.000	1	22.00 0.000	1	22.00 0.000	1	22.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Pengadaa n Gedung Kantor atau					0		60.53 9.298		0		0		0	Dinas Komunika si dan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Bangunan Lainnya *****													Digital		
		Tersedian ya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n *****	Unit	N/A	1	0	N /A	60.53 9.298	N /A	0	N /A	0	N /A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	Dinas Komunika si dan Informasi Digital
					Pengadaa n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					104.0 00.00 0		100.0 00.00 0		100.0 00.00 0		100.0 00.00 0		100.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Tersedian ya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n *****	Unit	N/A	8	104.0 00.00 0	8	100.0 00.00 0	8	100.0 00.00 0	8	100.0 00.00 0	8	100.0 00.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					20.00 0.000		20.00 0.000		20.00 0.000		20.00 0.000		20.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Tersedian ya Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n *****	Unit	N/A	N/ A	20.00 0.000	N /A	20.00 0.000	N /A	20.00 0.000	N /A	20.00 0.000	N /A	20.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
				Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah *****						7.101 .673. 761		7.963 .040. 981		9.997 .622. 420		12.94 8.922 .420		19.58 2.890 .641	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Tersedian ya jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah sesuai dengan kebutuha n perangkat daerah				Jumlah laporan penyedia an jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah yang disusun ****	Lapora n / Doku men	4	27	7.101 .673. 761	2 7	7.963 .040. 981	2 7	9.997 .622. 420	2 7	12.94 8.922 .420	2 7	19.58 2.890 .641	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	
					Penyedia an Jasa Surat Menyurat *****					1.700 .000		1.700 .000		1.700 .000		2.000 .000		2.500 .000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Penyedia an Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat	Lapora n	2	2	1.700 .000	2	1.700 .000	2	1.700 .000	2	2.000 .000	2	2.500 .000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)

					Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik *****					2.081 .973. 761		1.443 .340. 981		1.477 .922. 420		1.477 .922. 420		5.056 .390. 641	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Tersedian ya Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n *****	Lapora n	12	12	2.081 .973. 761	1 2	1.443 .340. 981	1 2	1.477 .922. 420	1 2	1.477 .922. 420	1 2	5.056 .390. 641	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Penyedia an Jasa					18.00		18.00		18.00		19.00		24.00	Dinas Komunika	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Peralatan dan Perlengka pan Kantor *****					0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	si dan Informasi Digital	
		Tersedian ya Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor				Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n *****	Lapora n	1	1	18.00 0.000	1	18.00 0.000	1	18.00 0.000	1	19.00 0.000	1	24.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	Dinas Komunika si dan Informasi Digital
					Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor *****					5.000 .000. 000		6.500 .000. 000		8.500 .000. 000		11.45 0.000 .000		14.50 0.000 .000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Tersedia n ya Jasa Pelayana n Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediaka n *****	Lapora n	12	12	5.000 .000. 000	1 2	6.500 .000. 000	1 2	8.500 .000. 000	1 2	11.45 0.000 .000	1 2	14.50 0.000 .000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
				Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah *****						383.9 00.00 0		390.1 00.00 0		395.4 00.00 0		432.5 00.00 0		552.9 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Tersedian ya jasa pemelihar aan barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ahan daerah				Jumlah unit barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ahan daerah yang dilakukan pemelihar aan ****	Unit	30	17 1	383.9 00.00 0	1 7 1	390.1 00.00 0	1 7 1	395.4 00.00 0	1 7 1	432.5 00.00 0	1 7 1	552.9 00.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	
					Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas					200.0 00.00 0		200.0 00.00 0		200.0 00.00 0		210.0 00.00 0		250.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Operasio nal atau Lapangan *****															
		Tersedian ya Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan				Jumlah Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajak dan Perizinan nya *****	Unit	20	20	200.0 00.00 0	2 0	200.0 00.00 0	2 0	200.0 00.00 0	2 0	210.0 00.00 0	2 0	250.0 00.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	OPD Provinsi< br>SEMA RANG
					Penyedia an Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar					0		0		0		0		0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rget	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					aan dan Perizinan Alat Besar *****															
		Tersedian ya Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Perizinan Alat Besar				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarka n Perizinan nya *****	Unit	N/A	N/ A	0	N /A	0	N /A	0	N /A	0	N /A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	Dinas Komunika si dan Informasi Digital
					Pemelihar aan Mebel *****					1.600 .000		1.600 .000		1.600 .000		1.700 .000		2.100 .000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Pemelihar aan Mebel				Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	100	10	1.600 .000	1 0	1.600 .000	1 0	1.600 .000	1 0	1.700 .000	1 0	2.100 .000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
																			WAIAN	
					Pemeliha aan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					10.00 0.000		10.00 0.000		10.00 0.000		10.50 0.000		15.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Pemeliha aan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	4	25	10.00 0.000	2 5	10.00 0.000	2 5	10.00 0.000	2 5	10.50 0.000	2 5	15.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Pemeliha aan Aset Tak Berwujud *****					12.00 0.000		12.00 0.000		12.00 0.000		12.80 0.000		15.80 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya				Jumlah Aset Tak	Unit	N/A	4	12.00	4	12.00	4	12.00	4	12.80	4	15.80	SUB BAGIAN	KOTA SEMARAN

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				Berwujud yang Dipelihara *****				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	UMUM DAN KEPEGAWAIAN	G OP D Provinsi
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					78.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000		150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi *****	Unit	2	2	78.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG OP D Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Pemeliha aan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					61.00 0.000		65.00 0.000		70.00 0.000		75.00 0.000		90.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Pemelihar aan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabil	Unit	10	10 6	61.00 0.000	1 0 6	65.00 0.000	1 0 6	70.00 0.000	1 0 6	75.00 0.000	1 0 6	90.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	Dinas Komunika si dan Informasi Digital

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Lainnya				itasi *****														
					Pemelihar aan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					21.30 0.000		21.50 0.000		21.80 0.000		22.50 0.000		30.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Pemelihar aan/Reha bilitasi Sarana dan				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor	Unit	4	4	21.30 0.000	4	21.50 0.000	4	21.80 0.000	4	22.50 0.000	4	30.00 0.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA WAIAN	Dinas Komunika si dan Informasi Digital

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabil itasi *****														
			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI ***							555.5 10.97 7		1.070 .000. 000		1.085 .000. 000		1.085 .000. 000		1.095 .000. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Meningka tnya kualitas pelayana n umum, kepegawa ian dan keuangan				Persentas e tingkat pelayaan umum, kepegawa ian dan keuangan perangkat	%	N/A	10 0	555.5 10.97 7	1 0 0	1.070 .000. 000	1 0 0	1.085 .000. 000	1 0 0	1.085 .000. 000	1 0 0	1.095 .000. 000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		perangkat daerah di UPT Pusat Data				daerah UPT Pusat Data ***														
				Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						416.700.0000		630.000.0000		630.000.0000		630.000.0000		640.000.0000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Melakukan pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar				Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah pada UPT Pusat Data yang	%	N/A	30	416.700.0000	60	630.000.0000	70	630.000.0000	90	630.000.0000	1000	640.000.0000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		layanan Dinas Komunika si dan Digital pada UPT Pusat Data				sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran ****														
					Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor *****					7.000 .000		50.00 0.000		50.00 0.000		50.00 0.000		50.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersedian ya Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan				Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan	Paket	N/A	1	7.000 .000	1	50.00 0.000	1	50.00 0.000	1	50.00 0.000	1	50.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Kantor				Kantor yang Disediaka n *****													Data	
					Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor *****					10.00 0.000		100.0 00.00 0		100.0 00.00 0		100.0 00.00 0		100.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersedian ya Peralatan dan Perlengka pan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n *****	Paket	N/A	1	10.00 0.000	1	100.0 00.00 0	1	100.0 00.00 0	1	100.0 00.00 0	1	100.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	JAWA TENGAH OPD Provinsi
					Penyedia an					10.00		30.00		30.00		30.00		30.00	Dinas Komunika	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Peralatan Rumah Tangga *****					0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersedian ya Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n *****	Paket	N/A	1	10.00 0.000	1	30.00 0.000	1	30.00 0.000	1	30.00 0.000	1	30.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
					Penyedia an Bahan Logistik Kantor *****					25.00 0.000		30.00 0.000		30.00 0.000		30.00 0.000		30.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersedian ya Bahan				Jumlah Paket	Paket	N/A	1	25.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	Dinas Komunika	Dinas Komunika

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Logistik Kantor				Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****				0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
					Fasilitasi Kunjunga n Tamu *****					54.70 0.000		60.00 0.000		60.00 0.000		60.00 0.000		70.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Terlaksan anya Fasilitasi Kunjunga n Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu *****	Lapora n	N/A	1	54.70 0.000	1	60.00 0.000	1	60.00 0.000	1	60.00 0.000	1	70.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
					Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD *****					300.0 00.00 0		350.0 00.00 0		350.0 00.00 0		350.0 00.00 0		350.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksan anya Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD *****	Lapora n	N/A	1	300.0 00.00 0	1	350.0 00.00 0	1	350.0 00.00 0	1	350.0 00.00 0	1	350.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
				Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah *****						35.81 0.977		250.0 00.00 0		250.0 00.00 0		250.0 00.00 0		250.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Melakuka n penyedia an barang milik daerah dalam rangka pemenuh an kebutuha n, sesuai dengan tupoksi Dinas Komunika si dan Digital pada UPT Pusat Data				Jumlah unit barang milik daerah yang disediaka n sebagai penunjan g urusan UPT Pusat Data, selama satu tahun anggaran *****	Unit	N/A	1	35.81 0.977	1	250.0 00.00 0	1	250.0 00.00 0	1	250.0 00.00 0	1	250.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
					Pengadaa n Mebel *****					35.81 0.977		250.0 00.00		250.0 00.00		250.0 00.00		250.0 00.00	Dinas Komunika si dan	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
												0		0		0		0	Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Tersedian ya Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n *****	Paket	N/A	1	35.81 0.977	2	250.0 00.00 0	3	250.0 00.00 0	4	250.0 00.00 0	5	250.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
				Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah *****						3.000 .000		10.00 0.000		25.00 0.000		25.00 0.000		25.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Melakuka n penyedia an jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah, sesuai dengan tupoksi Dinas Komunika si dan Digital pada UPT Pusat Data				Jumlah Laporan Jasa Pelayana n Umum Kantor di UPT Pusat Data *****	Lapora n	N/A	1	3.000 .000	1	10.00 0.000	1	25.00 0.000	1	25.00 0.000	1	25.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
					Penyedia an Jasa Surat Menyurat *****					3.000 .000		10.00 0.000		25.00 0.000		25.00 0.000		25.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital -	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
																			UPT Pusat Data	
		Terlaksan anya Penyedia an Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat *****	Lapora n	N/A	1	3.000 .000	2	10.00 0.000	3	25.00 0.000	4	25.00 0.000	5	25.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
				Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah *****						100.0 00.00 0		180.0 00.00 0		180.0 00.00 0		180.0 00.00 0		180.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Melakukan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Digital pada UPT Pusat Data				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara ****	%	N/A	100	100.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
					Pemeliharaan Mebel *****					0		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
																			Pusat Data	
		Terlaksan anya Pemelihar aan Mebel				Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	5	0	5	30.00 0.000	5	30.00 0.000	5	30.00 0.000	5	30.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
					Pemelihar aan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					100.0 00.00 0		150.0 00.00 0		150.0 00.00 0		150.0 00.00 0		150.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital - UPT Pusat Data	
		Terlaksan anya Pemelihar aan/Reha bilitasi				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	N/A	1	100.0 00.00 0	1	150.0 00.00 0	1	150.0 00.00 0	1	150.0 00.00 0	1	150.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital -	Dinas Komunika si dan Informasi Digital -

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi *****													UPT Pusat Data	UPT Pusat Data
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **									400.000.000		404.000.000		419.000.000		434.000.000		517.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
						Indeks Manajem en Risiko Perangkat Daerah Dinas Komunika si dan Informasi Digital **	Angka	2,738	3, 02	400.0 00.00 0	2, 8	404.0 00.00 0	2, 9	419.0 00.00 0	3	434.0 00.00 0	3, 0 1	517.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI ***							400.0 00.00 0		404.0 00.00 0		419.0 00.00 0		434.0 00.00 0		517.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Meningka tnya kualitas perencan aan dan evaluasi				Persentas e tingkat ketercapa ian kinerja perangkat	%	N/A	10 0	400.0 00.00 0	1 0 0	404.0 00.00 0	1 0 0	419.0 00.00 0	1 0 0	434.0 00.00 0	1 0 0	517.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital				daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital ***														
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****						400.000.000		404.000.000		419.000.000		434.000.000		517.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100	400.000.000	100	404.000.000	100	419.000.000	100	434.000.000	100	517.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp	T ar ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		daerah				yang disusun sesuai peraturan perundan gan ****														
					Penyusun an Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah *****					200.0 00.00 0		202.0 00.00 0		214.0 00.00 0		224.0 00.00 0		270.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Tersusun nya Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah *****	Doku men	5	5	200.0 00.00 0	5	202.0 00.00 0	5	214.0 00.00 0	5	224.0 00.00 0	5	270.0 00.00 0	SUB BAGIAN PROGRA M	OPD Provinsi Provin si Jawa Tengah (35 Kabupate n/Kota) dan Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rget	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp	T ar get	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
																				Lainnya, misal: DKI Jakarta, dll, DKI JAKARTA
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					150.0 00.00 0		152.0 00.00 0		155.0 00.00 0		160.0 00.00 0		197.0 00.00 0	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	
		Terlaksan anya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Lapora n	2	2	150.0 00.00 0	2	152.0 00.00 0	2	155.0 00.00 0	2	160.0 00.00 0	2	197.0 00.00 0	SUB BAGIAN PROGRA M	KOTA SEMARAN G OP D Provinsi
					Pelaksana an Pengump ulan Data Statistik Sektoral Daerah					25.00 0.000		25.00 0.000		25.00 0.000		25.00 0.000		25.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)

		Terlaksan anya Pengump ulan Data Statistik Sektoral Daerah				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpul kan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	N/A	N/ A	25.00 0.000	N /A	25.00 0.000	N /A	25.00 0.000	N /A	25.00 0.000	N /A	25.00 0.000	SUB BAGIAN PROGRA M	Dinas Komunika si dan Informasi Digital
					Penyelen ggaraan Walidata Pendukun g Statistik Sektoral Daerah *****					25.00 0.000		25.00 0.000		25.00 0.000		25.00 0.000		25.00 0.000	Dinas Komunika si dan Informasi Digital	

Tujuan	Sasaran	Output/O utcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Baseli ne Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangka t Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
									2026		2027		2028		2029		2030			
									Ta rg et	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp	T a r ge t	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(1 2)	(13)	(1 4)	(15)	(1 6)	(17)	(1 8)	(19)	(2 0)	(21)	(22)	(23)
		Terseleng garanya Walidata Pendukun g Statistik Sektoral Daerah				Jumlah Dokumen Hasil Penyelen ggaraan Walidata Pendukun g Statistik Sektoral Daerah *****	Doku men	N/A	N/ A	25.00 0.000	N /A	25.00 0.000	N /A	25.00 0.000	N /A	25.00 0.000	N /A	25.00 0.000	SUB BAGIAN PROGRA M	Dinas Komunika si dan Informasi Digital

Sumber : E-Planning Renstra 2025-2029

Tabel 4. 2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Daerah	Rencana Aktifitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3		4	5	6
I	Program Intervensi					
1	Pengembangan Sistem	Pengembangan aplikasi layanan terintegrasi	2025 : Pagu : - Target - 2026 : Pagu : - Target 4 2027 : Pagu : - Target 4 2028 : Pagu : - Target 4 2029 : Pagu : - Target - 2030 : Pagu : - Target -		Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	Seluruh OPD
2	Penyusunan Pergub	Penyusunan kebijakan atau regulasi berupa peraturan gubernur tentang integrasi aplikasi di Jawa Tengah ke dalam aplikasi "Jateng Ngopeni"	2025 : Pagu : - Target - 2026 : Pagu : Rp. 150,000,000 Target 3 2027 : Pagu : Rp. 151,500,000 Target 4 2028 : Pagu : Rp. 151,500,000 Target 4 2029 : Pagu : Rp. 151,500,000 Target 4 2030 : Pagu : Rp. 151,500,000 Target 4		Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	Seluruh OPD
3	Pelaksanaan Integrasi Aplikasi	Pelaksanaan integrasi aplikasi yang dimulai dari pemetaan aplikasi, pembelian lisensi,	2025 : Pagu : - Target - 2026 : Pagu : Rp.2.272.531.960 Target 5 2027 : Pagu : Rp. 2.254.857.000 Target 5 2028 : Pagu : Rp.		Bidang Aplikasi Pemerintah Digital	Seluruh OPD

		metode, arsitektur layanan, tenaga ahli/tim ahli, help desk, rapat koordinasi	2.277.406.000 Target 5 2029 : Pagu : Rp. 2.391.276.000 Target 5 2030 : Pagu : Rp. 2.943.179.000 Target 5			
No.	Program Daerah	Rencana Aktifitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3		4	5	6
II	Program Prioritas					
1	Pogram Prioritas	Pelatihan Public Speaking untuk Siswa SMA dan SMK di Jawa Tengah	2025 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan 2026 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan 2027 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan 2028 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan 2029 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan		Bidang Komunikasi Publik dan Media	Seluruh OPD

			2030 : Pagu : Rp. 25.000.000 Target 2 Kegiatan			
2	Pogram Prioritas	Internet untuk Kecamatan Berdaya	2025 : Pagu : Rp. 800.000.000 Target 149 2026 : Pagu : Rp. 2.000.000.000 Target 149 2027 : Pagu : Rp. 2.000.000.000 Target 149 2028 : Pagu : Rp. 2.000.000.000 Target 149 2029 : Pagu : Rp. 2.000.000.000 Target 149 2030 : Pagu : Rp. 2.000.000.000 Target 149		Bidang Infrastruktur Teknologi Digital	Seluruh OPD
No.	Program Daerah	Rencana Aktifitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3		4	5	6
I	Program Aksi					
1	Penyusunan Pergub Satuan Tugas Pengamanan	Penyusunan Revisi Pergub Sistem Manajemen	2025 : Pagu : Rp. 193.323.000 Target 1 2026 : Pagu : Rp. 263.920.000 Target 2	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Bidang Persandian dan Keamanan	Seluruh OPD

	Data Digital	Keamanan Informasi untuk mengakomodir Satuan Tugas Pengamanan Data Digital	2027 : Pagu : Rp. 343.000.000 Target 2 2028 : Pagu : Rp. 445.900.000 Target 2 2029 : Pagu : Rp. 579.670.000 Target 3 2030 : Pagu : Rp. 753.570.000 Target 3	Pemerintah Daerah Provinsi	Siber	
2	Penyusunan Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Data Digital Pergub	Implementasi Pencegahan dan Pengamanan Informasi dari ancaman insiden siber oleh Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) di Pemprov Jateng	2025 : Pagu : Rp. 525.790.000 Target 50 OPD 2026 : Pagu : Rp. 589.754.000 Target 50 OPD 2027 : Pagu : Rp. 629.754.000 Target 50 OPD 2028 : Pagu : Rp. 659.754.000 Target 50 OPD 2029 : Pagu : Rp. 689.754.000 Target 50 OPD 2030 : Pagu : Rp. 709.754.000 Target 50 OPD	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Seluruh OPD
No.	Program Daerah	Rencana Aktifitas Rill	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3		4	5	6

I	Program Taktis					
1	Program Taktis	Penyelenggaraan Forum Media dan Komunikasi Publik	2025 : Pagu : Rp. 874.762.000 Target 30 2026 : Pagu : Rp. 600.000.000 Target 4 2027 : Pagu : Rp. 606.000.000 Target 6 2028 : Pagu : Rp. 612.060.000 Target 8 2029 : Pagu : Rp. 642.663.000 Target 10 2030 : Pagu : Rp. 790.988.000 Target 12		Dinas Komdigi	Seluruh OPD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Kinerja instansi pemerintahan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja mencerminkan tugas dan fungsi organisasi dan pemilihan indikator kinerja didasarkan prioritas dan fokus organisasi.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasikan bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 4.3 dan 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4. 3 *Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Angka	3,07	4,50	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks Pemerintahan Digital	Angka	-	2	2,1	2,3	2,3	2,7	3	3,1	3,1
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital,	Angka	-	-	4,03	4,08	4,15	4,23	4,23	4,27	4,27
	Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data terstruktur dan sistematis	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Angka	-	-	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3
Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	69,02	69,2	69,23	69,25	69,5	7,0	7,01	70,02	70,02
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan	Indeks Manajemen Resiko Perangkat	Angka	2,738	3,01	3,02	2,8	2,9	3	3,01	3,02	3,02

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Resiko Perangkat Daerah.	Daerah										
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	78	79	79,5	80	80,05	81	81,5	82	82

Sumber : E-planning Renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel 4.3, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan salah satu sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, ditetapkan sebagai tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan. Adapun indikatornya yaitu Indeks Pemerintah Digital sebagai indikator. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menargetkan angka indeks Pemerintah Digital pada tahun 2026 sebesar 2,01, tahun 2027 sebesar 2,3, dan pada tahun 2028 sebesar 2,7, dan pada tahun 2029 sebesar 3. Indeks ini mengatur penguatan tata kelola pemerintah digital, penguatan teknologi pemerintah digital, pengembangan hingga implementasi digital serta penguatan persandian dan penguatan data. Sedangkan terkait dengan indikator Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk mengukur sasaran meningkatnya layanan tata kelola data terstruktur dan sistematis, dengan angka target pada Tahun 2026 – 2029 masing – masing sebesar 4,85. Tingkat kematangan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mengatur sasaran meningkatnya pemanfaatan infrastruktur TIK dengan angka target pada Tahun 2026 sebesar 4,03 Tahun 2027 sebesar 4,08, Tahun 2028 sebesar 4,15 dan Tahun 2029 sebesar 4,23.

Tabel 4. 4 Indikator Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN			2029	KONDISI AKHIR
		2024	2025	2026	2027	2028		
	dan Informasi Digital							
2.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	78%	79%	79,5%	80%	80,5%	81%	81%
3.	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	85	81	85	86	87	88	88
4.	Indeks Satu Data Indonesia	-	85	86	87	88	89	89
5.	Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	0	20	25	40	60	80	80
6.	Tingkat Pembangunan / Pengembangan Aplikasi	-	-	12	22	35	47	47
7.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	-	3,58	3,59	3,6	3,61	3,62	3,62
8.	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	-	60	65	68	70	72	72

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
9.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	-	100	100	100	100	100	100

Sumber : E-Planning Renstra 2025 - 2029

Berdasarkan tabel 4.4, Indikator Program Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai dua tujuan PD yaitu meningkatkan kapabilitas teknologi pemerintahan dan meningkatkan kualitas kualitas tata kelola perangkat daerah berintegrasi dan dinamis dengan 9 indikator program yaitu :

- Program Aplikasi Informatika - 3 Indikator
- Program IKP - 1 Indikator
- Program Persandian - 1 Indikator
- Program infrastruktur - 1 Indikator
- Program Penunjang - 3 Indikator

Tabel 4. 5 *Tabel Indikator Kinerja Kunci*

No .	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Urusan Kominfo	%	%	%	%	%	%	%	%	
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskomdigi	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	
1.	Urusan									

No .	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Statistik									
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	Urusan Persandian									
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.	Tambahan Urusan Kominfo									

No .	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	

Pada Tabel 4.5 menjelaskan bahwa Diskominifo Provinsi Jawa Tengah memiliki 8 (Delapan) Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) pada urusanj Kominfo, Statisti, persandian sebagaimana dijelaskan dalam permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang peraturan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Diskominfo Provinsi Jawa Tengah adalah **NIHIL** karena bukan termasuk perangkat daerah yang terkait 6 (Enam) urusan wajib Pelayanan Dasar.

BAB V

PENUTUP

Dokumen rencana strategis Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 - 2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman bagi Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun rencana kerja guna penyelenggaraan kegiatan pada urusan komdigi, statistik dan persandian di lingkup Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra Diskomdigi Prov. Jawa Tengah Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Prov. Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terkait dengan kebijakan umum pembangunan dalam urusan komdigi, statistik dan persandian dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu strategis untuk mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis Digital dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Keberhasilan program dan kegiatan Diskomdigi Prov. Jawa Tengah secara terpadu dapat mendukung tercapainya tujuan Perangkat Daerah yaitu “Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan” sekaligus juga mewujudkan tujuan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan” khususnya untuk sasaran keempat yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif Serta Stabilitas Pembangunan Daerah”.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Diskomdigi Prov. Jateng melakukan berbagai strategi dan upaya, antara lain:

1. Melakukan penguatan pengelolaan layanan dan tata kelola infrastruktur TIK;
2. Mengoptimalkan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi;
3. Meningkatkan aplikasi berbagi pakai dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan/dikelola;
4. Mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai rencana induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas;

5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistic sektoral Jawa Tengah;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan layanan data statistik dan data geospasial;
7. Meningkatkan ketercapaian penyelenggaraan Big Data;
8. Meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital;
9. Menetapkan kebijakan tata kelola dan layanan kemanan informasi serta jarring komunikasi sandi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Mengoptimalkan pengelolaan informasi publik;
11. Meningkatkan kualitas konten informasi publik yang disebarluaskan baik melalui media internal maupun eksternal;
12. Meningkatkan keterbukaan Badan Publik.

Diharapkan melalui Renstra yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual pembangunan Diskomdigi, sehingga target indikator kinerja program (outcome) yang diharapkan, dapat tercapai dengan dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Diskomdigi beserta keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian karena ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dapat dilakukan review sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Diskomdigi Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Diskomdigi berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, diwajibkan

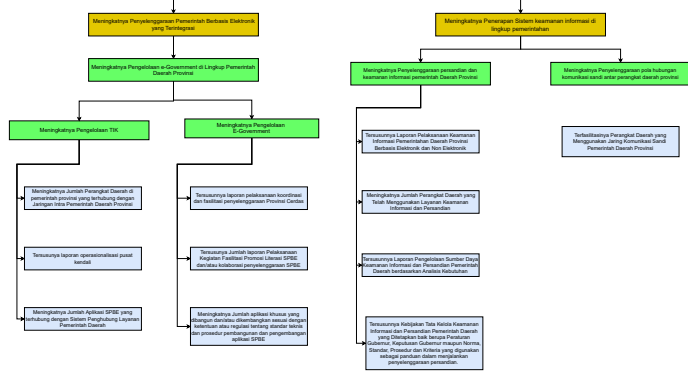
menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;

4. Renstra Diskomdigi Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah.

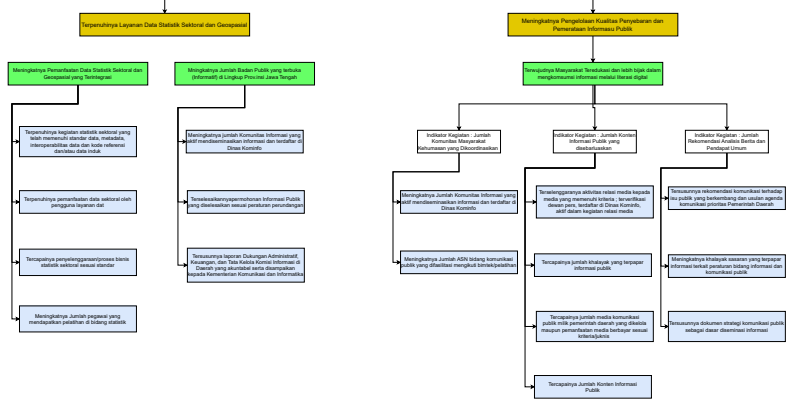
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah. Monitoring dan Evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Tujuan 1 PG: Meningkatkan Kapasitas Sasaran Pemerintah

Sasaran 1 PG: "Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)"



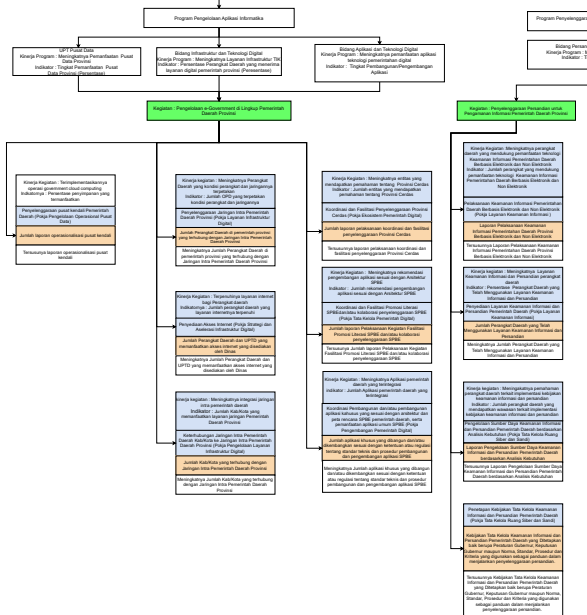
Sasaran 2 PG: "Meningkatnya Layanan TIK Kota Data Terstruktur dan Sistematis"



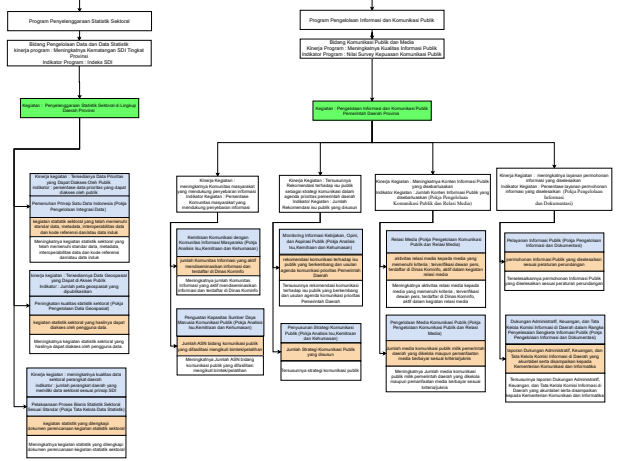
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIGITAL

Tabel 1 PGC Mengetahui Kapasitas, Tindakan, Perencanaan, dan Program Perencanaan Digital

Sektor 1 PGC "Mengembangkan Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)" (Tipe Program Perencanaan: Teknologi Digital (Indikator 1.1, 1.2 dan 4.1))



Sektor 2 PGC "Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)" (Tipe Program Perencanaan: Layanan Teknologi Informasi (Indikator 2.1))



A. Identifikasi Risiko

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Strategis	Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan *	Indeks Pemerintah Digital							Rendahnya tingkat kematangan indeks Pemdi	Risiko Kepatuhan	-Keterlambatan pemenuhan dokumen Pemdi - Ketidak sinkronan dengan SPBE yang sedang berjalan - lemahnya kolaborasi dengan listas OPD - terbatasnya SDM - rendahnya partisipasi pulik - rendahnya keamanan informasi dan privasi - data tidak tersandar	Skor nilai pemdi turun	Pemerintah provinsi jawa tengah
Sasaran Strategis			Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK **	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital					Transformasi digital gagal dilakukan	Resiko Operasional	-Integrasi yang rumit dikarenakan tidak ada standar yang seragam dapat menyebabkan setiap lembaga pemerintahan membangun sistemnya sendiri, sehingga mempersulit integrasi data dan layanan antar-instansi -Keamanan data yang rentan	-Pengambilan keputusan yang tidak akurat -Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk mengelola layanan publik	Pemerintah provinsi jawa tengah
Sasaran Program					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA ***	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi (Persentase)			Gangguan operasional pada Pusat Data Provinsi	Resiko Operasional	- Gangguan pada DC Facilities (power failure dan atau Kegagalan sistem pendingin) - Serangan siber (malware, DDoS) - Keterbatasan kapasitas server/storage - Human error dalam pengelolaan sistem	Layanan publik digital (e-government, aplikasi daerah, layanan data) tidak dapat diakses	Pemerintah provinsi jawa tengah
Sasaran Kegiatan							Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi *****	Persentase penyimpanan yang termanfaatkan	Layanan Publik berbasis elektronik tidak dapat diakses/penurunan performa (melambat)	Resiko Operasional	Gangguan operasional pada layanan pusat data berupa: - Gangguan perangkat server/storage (kerusakan hardware, overheating, atau kehabisan kapasitas) - Kegagalan sistem pendingin dan listrik (power failure) - Kesalahan konfigurasi sistem (human error) - Serangan siber (malware, ransomware, atau DDoS) - Keterlambatan pemeliharaan infrastruktur pusat data	Masyarakat tidak dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik	Pemerintah provinsi jawa tengah
Sasaran Program						Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan digital pemerintah provinsi			Layanan Digital kepada perangkat daerah terhenti	Resiko Operasional	Pengelolaan layanan digital kepada perangkat daerah tidak optimal	Lumpuhnya layanan digital pemerintahan dan publik	-Seluruh OPD lingkup Pemprov Jateng "-Masyarakat pengguna layanan digital publik"

A. Identifikasi Risiko

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Kegiatan							Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi *****	Jumlah OPD yang terpetakan kondisi perangkat dan jaringannya	Gangguan operasional pada perangkat jaringan internet yang rusak atau tidak memenuhi standar tidak dapat segera ditangani	Resiko Operasional	- Keterbatasan stok perangkat pengganti - Proses pengadaan yang memerlukan waktu lebih lama dan mengikuti regulasi penggunaan produk dalam negeri. Sedangkan perangkat jaringan yang digunakan tidak ditemukan barang substitusi yang sebanding - Keterbatasan teknisi atau tim operasional	Lumpuhnya operasional kegiatan OPD	Seluruh OPD
Sasaran Kegiatan								Jumlah perangkat daerah yang layanan internetnya terpenuhi	Gangguan operasional pada jaringan Jateng Online	Resiko Operasional	- Terjadi gangguan pada sumber internet menyebabkan seluruh koneksi Jateng Online ke OPD terhenti (blackout) - Terjadinya FO Cut pada Jaringan Jateng Online - Terdapat gangguan perangkat jaringan induk	Terhentinya operasional layanan pemerintah dan publik serta menurunnya kepercayaan masyarakat.	- Seluruh OPD lingkup Pemprov Jateng - Masyarakat pengguna layanan digital publik
Sasaran Kegiatan								Jumlah Kab/Kota yang memanfaatkan layanan jaringan Pemerintah Daerah Provinsi	Gangguan operasional pada jaringan integrasi Kab/Kota	Resiko Operasional	- Terdapat gangguan perangkat jaringan Metro Kab/Kota - Terdapat gangguan pada jaringan penyedia Metro	Gangguan pada jaringan metro menyebabkan kabupaten/kota tidak dapat mengakses layanan publik digital miliknya yang ditempatkan di data center provinsi	Seluruh Kab/Kota
Sasaran Program					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA ***	Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi			Pembangunan/pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	Resiko Operasional	- Penerapan Arsitektur SPBE belum dipahami secara menyeluruh - Kurangnya koordinasi dan komitmen antar OPD untuk integrasi data dan layanan	- Data antar aplikasi tidak sinkron dan sulit dimanfaatkan bersama - Efisiensi layanan digital menurun - Menghambat terwujudnya ekosistem pemerintahan digital terpadu	OPD Pemprov Masyarakat
Sasaran Kegiatan							Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi ****	Jumlah entitas yang mendapatkan pemahaman tentang Provinsi Cerdas sesuai dengan Rencana Induk Smart Province	Rendahnya jumlah entitas yang memahami konsep dan implementasi Provinsi Cerdas sesuai Renduk Smart Province	Risiko Operasional	- Sosialisasi dan pendampingan belum menjangkau seluruh entitas dan tidak dilakukan secara berkala - Koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan masih terbatas dan tidak dilakukan secara berkala	- Implementasi Smart Province tidak berjalan selaras dan tidak terarah antar sektor - Keterlambatan pencapaian target Renduk - Rendahnya komitmen dan kolaborasi antar entitas	OPD Pemprov Masyarakat

A. Identifikasi Risiko

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Kegiatan								Jumlah rekomendasi teknis pengembangan aplikasi sesuai dengan Arsitektur SPBE	Rekomendasi teknis pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	Risiko Operasional	- Penerapan Arsitektur SPBE belum dipahami secara menyeluruh - Belum tersedia panduan teknis yang lengkap dan terstandardisasi	- Terjadinya duplikasi aplikasi dan inefisiensi sumber daya TI - Ketidakterpaduan data dan layanan antar aplikasi pemerintah - Penurunan nilai maturitas SPBE bidang aplikasi dan arsitektur	OPD Pemprov Masyarakat
Sasaran Kegiatan								Presentase Aplikasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Rendahnya persentase aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sistem lain	Risiko Operasional	- Kurang/tidak meratanya tim teknis dan anggaran integrasi di OPD - Tidak adanya standar integrasi dan interoperabilitas yang dipatuhi	- Data antar aplikasi tidak sinkron dan sulit dimanfaatkan bersama - Efisiensi layanan digital menurun - Menghambat terwujudnya ekosistem pemerintahan digital terpadu	OPD Pemprov Masyarakat
Sasaran Program					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI ***	Tingkat Keamanan Siber			Terjadi peretasan terhadap domain jatengprov.go.id	Resiko Operasional	Belum ada sosialisasi dan koordinasi penerapan standar SMKI di perangkat daerah	Meningkatnya jumlah insiden keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah provinsi jawa tengah	OPD Pemprov Masyarakat
Sasaran Kegiatan							Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi ****	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan wawasan terkait implementasi kebijakan keamanan informasi dan persandian	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam kegiatan sosialisasi keamanan informasi rendah	Resiko Operasional	Materi sosialisasi tidak relevan dengan isu keamanan informasi di perangkat daerah	Penerapan kebijakan keamanan informasi tidak dapat diterapkan secara menyeluruh	OPD Pemprov Masyarakat
									Kegagalan terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan pemerintah provinsi jawa tengah	Risiko Kepatuhan	Perangkat daerah belum menerapkan kaedah PDP pada Sistem elektronik	- ketidakpatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi; - Sanksi hukum berdasarkan peraturan perundangan	OPD Pemprov

A. Identifikasi Risiko

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Risiko keamanan informasi pada sistem elektronik perangkat daerah tidak terpetakan	Resiko Operasional	Sistem Elektronik Perangkat Daerah yang belum memenuhi standar SMKI	Penerapan kontrol keamanan tidak sesuai dengan standar keamanan, memungkinkan celah risiko keamanan tidak ditangani dengan baik	OPD Pemprov
Sasaran Kegiatan							Jumlah perangkat daerah yang mendukung pemanfaatan teknologi keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan nonelektronik		Kehilangan data dan informasi dari sistem elektronik yang disebabkan oleh virus dan malware;	Risiko Reputasi	- Terdapat celah keamanan pada aplikasi milik perangkat daerah yang belum ditindaklanjuti. - Perangkat daerah tidak melakukan prosedur backup restore dengan baik.	- Menurunnya tingkat kepercayaan publik;	OPD Pemprov Masyarakat
									Kebocoran informasi pemerintah provinsi yang bersifat penting atau rahasia	Resiko Operasional	Jalur komunikasi untuk mengirimkan informasi tidak menggunakan jalur yang aman	Informasi penting atau rahasia dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengganggu atau membatalakan efektivitas rencana Pemprov	OPD Pemprov Masyarakat
									Pemalsuan dokumen elektronik pemerintah provinsi jawa tengah	Resiko Operasional	Dokumen dan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi jawa tengah tidak menggunakan TTE	Memperlambat kinerja pelayanan publik karena perlu melakukan verifikasi keaslian dokumen	OPD Pemprov Masyarakat
							Jumlah SDM persandian dan keamanan informasi yang ditingkatkan kapasitasnya		Penyalahgunaan data dan informasi strategis milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Resiko Operasional	- Kurangnya kesadaran pegawai mengenai keamanan informasi; - Tidak menerapkan manajemen kontrol akses pada Sistem Elektronik; - Pengguna aplikasi tidak melakukan pergantian password secara berkala;	Data dan informasi digunakan pihak yang tidak berwenang untuk melakukan penipuan	OPD Pemprov Masyarakat
							Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian		Pemenuhan permintaan layanan keamanan informasi melebihi batas perjanjian layanan	Resiko Operasional	Dokumentasi pengembangan aplikasi yang tidak lengkap, fungsi keamanan aplikasi yang tidak diterapkan	Perangkat daerah mencari solusi di luar layanan internal yang belum terjamin keamanannya	OPD Pemprov
									Terjadinya gangguan layanan elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Resiko Operasional	Adanya serangan siber pada sistem elektronik pendukung layanan	Layanan elektronik pemerintah provinsi jawa tengah tidak dapat diakses / digunakan;	OPD Pemprov Masyarakat

A. Identifikasi Risiko

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Penyadapan atau kebocoran informasi rahasia melalui perangkat komunikasi nirkabel yang tidak sah	Resiko Operasional	Tidak dilakukan pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal pada kegiatan penting pemerintah provinsi jawa tengah	Terungkapnya isi rapat pimpinan, bocornya dokumen rahasia, kegagalan kegiatan pimpinan	
Sasaran Kegiatan							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi *****	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	Akses ilegal ke akun email sanapati yang digunakan sebagai sarana Jaring Komunikasi Sandi	Resiko Operasional	- Pengguna melakukan sharing user dan password, - Terdapat pencurian akun	Informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang	
Sasran Strategis			Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis **	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi					Menurunnya nilai keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	Risiko Reputasi	Masih adanya ego sektoral dalam pemenuhan instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Menurunnya kategori keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat
Sasaran Program					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK ***	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik			Menurunnya nilai survey komunikasi publik	Risiko Reputasi	1. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan pemetaan informasi publik 2. Kurangnya media komunikasi publik yang digunakan 3. Kurangnya partisipasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi	Masyarakat kurang percaya dan puas terhadap layanan komunikasi publik	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat
Sasaran Kegiatan							Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi *****	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat yang Mendukung Penyebaran Informasi	Rendahnya persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif mendukung penyebaran informasi publik dapat menghambat efektivitas diseminasi informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.	Resiko Operasional	•Kurangnya kapasitas dan literasi digital anggota KIM dalam mengelola serta menyebarkan informasi publik. •Koordinasi dan pendampingan yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan KIM. •Rendahnya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunikasi publik. •Kurangnya inovasi dan adaptasi media komunikasi sesuai dengan tren digital dan kebutuhan audiens.	• Informasi program dan kebijakan pemerintah daerah tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat. • Berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akibat kurangnya informasi yang akurat. • Potensi meningkatnya disinformasi dan hoaks di masyarakat.	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat

A. Identifikasi Risiko

Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
												Uraian	Pihak yang terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sasaran Kegiatan								Jumlah Rekomendasi Isu Publik yang Disusun	Isu hoaks dan pemberitaan dengan sentiment negatif semakin menyebar luas	Resiko Operasional	1. SKPD Pemprov Jateng belum menindaklanjuti isu dengan sentiment negatif 2. Kesulitan menelusuri informasi hoaks terkait Jateng	Hoaks dan pemberitaan dengan sentiment negatif semakin meluas, menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat
Sasaran Kegiatan								Jumlah Konten Informasi Publik yang Disebarluaskan	Kurangnya penyebarluasan informasi hasil pembangunan kepala daerah	Resiko Operasional	Kurangnya media komunikasi publik yang digunakan	Masyarakat tidak mengetahui informasi terkait hasil pembangunan	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat
Sasaran Kegiatan								Persentase Permohonan Layanan Informasi yang Diselesaikan	Menurunnya jumlah permohonan informasi yang terselesaikan sesuai peraturan perundangan	Resiko Operasional	- Kurangnya pemahaman petugas pelayanan informasi - Kurangnya komitmen pimpinan badan publik terhadap pentingnya pelayanan informasi publik	- Permohonan informasi tidak terselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; - Informasi publik tidak tersampaikan ke masyarakat - Meningkatnya jumlah sengketa informasi publik	SKPD Pemprov Jateng Masyarakat
Sasaran Program					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL ***	Indeks Satu Data Indonesia (SDI)			Menurunnya hasil penilaian penerapan SDI di Pemprov Jateng	Resiko Operasional	1. Komitmen para penyelenggara Satu Data Jawa Tengah kurang 2. Kompetensi teknis dan non teknis para penyelenggara kurang	Kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data Jawa Tengah kurang	Pemprov Jateng
Sasaran Kegiatan							Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi ****	Persentase Data Prioritas yang dapat diakses publik	Data Prioritas tidak memenuhi prinsip Satu Data	Resiko Operasional	1. Komitmen pemenuhan data data produsen data kurang 2. Pengelolaan data sektoral di perangkat daerah belum optimal	Akses terhadap data prioritas daerah terhambat	SKPD Prov. Jateng Pengguna data lainnya
Sasaran Kegiatan								Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Data Sektoral sesuai Prinsip SDI	Data Sektoral Daerah kurang berkualitas	Resiko Operasional	1. Pengelolaan data sektoral di perangkat daerah belum optimal 2. Kompetensi produsen data tentang pengelolaan data kurang 3. Belum adanya sistem monev dari Walidata Daerah terhadap penerapan pengelolaan data sektoral	Pengguna data mengakses data yang kurang berkualitas	SKPD Prov. Jateng Pengguna data lainnya

B. Analisis Risiko

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala/Nilai Risiko Residu		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran Program										
1	Gangguan operasional pada Pusat Data Provinsi	4	4	16	Ada	- Dibentuknya Tim Server dan jadwal jaga data center (Piket) untuk monitoring kinerja server 7x24 jam/hari - Penunjukan PIC di masing-masing SKPD Prov dan Pemda Kab/Kota untuk fasilitasi permohonan hosting/vps/colocation/backup di data center - Pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana data center - Pemenuhan kekurangan sarana prasarana data center yang masih kurang	Memadai	3	4	12
2	Layanan Digital kepada perangkat daerah terhenti	4	5	20	Ada	- Sosialisasi regulasi/SOP kepada pengguna layanan - Pengawasan secara berjenjang - Pembangunan aplikasi sebagai alat bantu monitoring dan dokumentasi	Memadai	3	4	12
3	Pembangunan/pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	3	4	12	Ada	1. Penyelarasan Arsitektur SPBE dan penyusunan Renduk Smart Province sebagai dasar integrasi sistem 2. Penerapan portal layanan untuk memfasilitasi integrasi antar aplikasi 3. Koordinasi rutin dengan OPD pengelola aplikasi untuk sinkronisasi data dan sistem	Memadai	2	3	6
4	Terjadi peretasan terhadap domain jatengprov.go.id	4	5	20	Ada	1. Pembentukan JatengProv CSIRT 2. Bimtek Keamanan Siber bagi agen CSIRT 3. Penerapan Pergub Jateng 25/2023 tentang SMKI	Belum Memadai	4	3	12
5	Menurunnya nilai survey komunikasi publik	3	4	12	Ada	1. Monitoring dan pemetaan informasi publik 2. Publikasi di berbagai kanal media 3. Koordinasi dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Memadai	3	3	9
6	Menurunnya hasil penilaian penerapan SDI di Pemprov Jateng	4	4	16	Ada	Penyusunan Juknis turunan Pergub	Belum Memadai	3	4	12
7	Target persentase pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak tercapai	2	3	6	Ada	Pemutakhiran SOP pelayanan umum,kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.	Belum Memadai	1	3	3
8	Kinerja perangkat daerah tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan	3	3	9	Ada	-Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dilaksanakan setiap bulan -Rakor Perencanaan dan Evaluasi	Belum Memadai	2	4	8
Sasaran Kegiatan										
1	Layanan Publik berbasis elektronik tidak dapat diakses/penurunan performa (melambat)	4	4	16	Ada	- Sosialisasi regulasi/SOP kepada pengguna layanan - Pengawasan secara berjenjang - Pembangunan aplikasi sebagai alat bantu monitoring dan dokumentasi	Memadai	3	4	12
2	Gangguan operasional pada perangkat jaringan internet yang rusak atau tidak memenuhi standar tidak dapat segera ditangani	4	3	12	Ada	1. Monitoring dan pemeliharaan perangkat secara berkala 2. Inventarisasi kondisi dan kebutuhan perangkat 3. Peningkatan kapasitas SDM untuk perbaikan ringan	Memadai	3	2	6
3	Gangguan operasional pada jaringan Jateng Online	3	5	15	Ada	1. Penyediaan link internet ganda 2. Penyediaan proteksi keamanan Anti DDOS 3. Peningkatan kapasitas SDM untuk <i>troubleshooting</i>	Memadai	3	4	12
4	Gangguan operasional pada jaringan integrasi Kab/Kota	4	3	12	Ada	Penguatan kolaborasi dengan penyedia layanan dan kabupaten/kota dalam monitoring, perbaikan, serta pendataan kebutuhan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu serta personil	Memadai	4	2	8
5	Rendahnya jumlah entitas yang memahami konsep dan implementasi Provinsi Cerdas sesuai Renduk Smart Province	3	3	9	Ada	Penguatan kolaborasi dan pemantauan implementasi Smart Province dengan stakeholder terkait melalui sosialisasi, desk, FGD	Memadai	2	3	6

B. Analisis Risiko

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala/Nilai Risiko Residu		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rekomendasi teknis pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	3	4	12	Ada	1. Monev pengembangan aplikasi 2. Penyelarasan Arsitektur SPBE Pemda	Memadai	2	4	8
	Rendahnya persentase aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sistem lain	3	4	12	Ada	1. Penyelarasan Arsitektur SPBE dan penyusunan Renduk Smart Province sebagai dasar integrasi sistem 2. Penerapan portal layanan untuk memfasilitasi integrasi antar aplikasi 3. Koordinasi rutin dengan OPD pengelola aplikasi untuk sinkronisasi data dan sistem	Memadai	2	3	6
	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam kegiatan sosialisasi keamanan informasi rendah	3	3	9	Ada	1. Koordinasi kegiatan SMKI antara kab/kota provinsi jawa tengah dan BSSN 2. Bimtek/Sosialisasi keamanan informasi bagi OPD 3. Bimtek/Sosiالسiasi keamanan informasi bagi Kab/Kota	Memadai	1	3	3
	Kegagalan terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan pemerintah provinsi jawa tengah	2	5	10	Ada	1. Tindak lanjut penanganan insiden kebocoran data; 2. Budaya Literasi Keamanan Informasi & Pelindungan Data Pribadi	Belum Memadai	2	4	8
	Risiko keamanan informasi pada sistem elektronik perangkat daerah tidak terpetakan	3	4	12	Ada	1. Identifikasi risiko keamanan informasi 2. Pengisian Profil Risiko Kamsiber	Belum Memadai	2	4	8
	Kehilangan data dan informasi dari sistem elektronik yang disebabkan oleh virus dan malware;	2	3	6	Ada	1. Implementasi antivirus, 2. Pelaksanaan Prosedur Backup 3. Uji coba restore 4. Penyusunan skenario dan pelaksanaan simulasi BCP	Memadai	2	2	4
	Kebocoran informasi pemerintah provinsi yang bersifat penting atau rahasia	2	3	6	Ada	1. Implementasi SSL, 2. Pelaksanaan Uji Keamanan, 3. Manajemen Insiden Siber, 4. Penerapan Intelegején Ancaman, 5. Patroli siber 6. Pengelolaan Email ASN	Memadai	1	3	3
	Pemalsuan dokumen elektronik pemerintah provinsi jawa tengah	1	4	4	Ada	1. Implementasi TTE BsRE 2. Integrasi TTE ke sistem elektronik 3. Pendampingan penerbitan sertifikat elektronik	Memadai	1	3	3
	Penyalahgunaan data dan informasi strategis milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2	4	8	Ada	1. Awareness KI di sosial media melalui KAMISAN (Keamanan Siber dan Sandi), 2. Webinar keamanan siber, 3. Penilaian Tingkat Keamanan Informasi (Indeks KAMI) 4. Evaluasi kebijakan dan prosedur keamanan informasi 5. Pelaksanaan Audit Internal Keamanan Informasi 6. Pelaksanaan sertifikasi ISO 27001	Memadai	1	4	4

B. Analisis Risiko

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala/Nilai Risiko Residu		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemenuhan permintaan layanan keamanan informasi melebihi batas perjanjian layanan	2	3	6	Ada	1. SOP Rekomtek 2. Monitoring tindak lanjut insiden 3. Montoring kerentanan sistem elektronik	Memadai	1	3	3
	Terjadinya gangguan layanan elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	3	4	12	Ada	1. Penggunaan <i>Web Application Firewall</i> 2. Pelaksanaan ITSA BSSN	Memadai	2	3	6
	Penyadapan atau kebocoran informasi rahasia melalui perangkat komunikasi nirkabel yang tidak sah	1	5	5	Ada	1. Fasilitasi layanan pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal (Jammer) 2. Perawatan alat jammer secara berkala	Memadai	1	4	4
	Akses ilegal ke akun email sanapati yang digunakan sebagai sarana Jaring Komunikasi Sandi	2	3	6	Ada	1. Notifikasi perubahan password secara berkala, 2. Konfigurasi password, 3. Sosialisasi penggunaan email sanapati	Memadai	2	2	4
	Rendahnya persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif mendukung penyebaran informasi publik dapat menghambat efektivitas diseminasi informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.	3	4	12	Ada	1. Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat melalui Kompetisi atau perlombaan 2. peningkatan kapasitas kelompok FK Metra maupun KIM melalui pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, dan workshop	Memadai	2	4	8
	Isu hoaks dan pemberitaan dengan sentiment negatif semakin menyebar luas	3	4	12	Ada	1. Peningkatan kapasitas Tim Analis Berita SKPD Pemprov Jateng untuk menindaklanjuti pemberitaan dengan sentiment negatif 2. Peningkatan kerjasama dengan Kominfo Kab/Kota dan Mafindo dalam rangka meminimalisir berita hoaks	Memadai	2	4	8
	Kurangnya penyebarluasan informasi hasil pembangunan kepala daerah	3	4	12	Ada	Peningkatan kerja sama dengan media	Memadai	2	4	8
	Menurunnya jumlah permohonan informasi yang terselesaikan sesuai peraturan perundangan	3	4	12	Ada	1. Peningkatan kapasitas pengelola PPID melalui pelatihan, bintek, dan workshop 2. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Memadai	2	4	8
	Data Prioritas tidak memenuhi prinsip Satu Data	4	4	16	Ada	1. Pengembangan Portal Data Jawa tengah 2. Koordinasi teknis dengan perangkat daerah/instansi dalam rangka penyediaan data prioritas	Belum Memadai	3	4	12
	Data Sektoral Daerah kurang berkualitas	4	4	16	Ada	Peningkatan kualitas kegiatan pemeriksaan data sektoral	Belum Memadai	3	4	12

B. Analisis Risiko

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala/Nilai Risiko Residu		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tidak tersedianya data geospasial yang berkualitas	3	3	9	Ada	-Desk Pengumpulan dafatar data geospasial -Bimbingan Teknis Pengelolaan SImpul Jaringan	Memadai	2	3	6
	Terlambatnya penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Revisi secara berkala terhadap SOP layanan pada subbag keuangan Peningkatan kompetensi untuk pegawai yang menangani laporan keuangan	Memadai	1	2	2
	Kurang berkualitasnya pemeliharaan dan administrasi BMD	3	2	6	Ada	Pendataan aset yang lebih komprehensif	Memadai	2	2	4
	Terlambatnya proses layanan kepegawaian dan administrasi umum	2	3	6	Ada	Revisi secara berkala terhadap SOP layanan kepegawaian. Peningkatan kompetensi untuk pegawai yang menangani kepegawaian.	Memadai	2	2	4
	Tidak terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	2	3	6	Ada	Memperbaiki daftar prioritas kebutuhan layanan umum selama satu tahun	Memadai	1	3	3
	Kualitas spesifikasi pengadaan BMD tidak sesuai standar	2	5	10	Ada	Melaksanakan koordinasi dengan pihak penyedia untuk memastikan BMD memenuhi standar yang berlaku.	Memadai	2	4	8
	Spesifikasi website/aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan OPD	2	3	6	Ada	Mengoptimalkan fitur layanan dalam website Diskomdigi	Memadai	1	3	3
	Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Rehab Gedung	3	3	9	Ada	Melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan pekerjaan serta jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan.	Memadai	2	3	6
	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	2	5	10	Ada	Rapat Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi	Memadai	1	4	4

C. Penetapan Risiko Prioritas

No.	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5	6
Sasaran Program					
1	Gangguan operasional pada Pusat Data Provinsi	16	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	- Gangguan pada DC Facilities (power failure dan atau Kegagalan sistem pendingin) - Serangan siber (malware, DDoS) - Keterbatasan kapasitas server/storage - Human error dalam pengelolaan sistem	Layanan publik digital (e-government, aplikasi daerah, layanan data) tidak dapat diakses
2	Layanan Digital kepada perangkat daerah terhenti	20	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	Pengelolaan layanan digital kepada perangkat daerah tidak optimal	Lumpuhnya layanan digital pemerintahan dan publik
3	Pembangunan/pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	12	Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Digital	- Penerapan Arsitektur SPBE belum dipahami secara menyeluruh - Kurangnya koordinasi dan komitmen antar OPD untuk integrasi data dan layanan	- Data antar aplikasi tidak sinkron dan sulit dimanfaatkan bersama - Efisiensi layanan digital menurun - Menghambat terwujudnya ekosistem pemerintahan digital terpadu

4	Terjadi peretasan terhadap domain jatengprov.go.id	20	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Belum ada sosialisasi dan koordinasi penerapan standar SMKI di perangkat daerah	Meningkatnya jumlah insiden keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah provinsi jawa tengah
5	Menurunnya nilai survey komunikasi publik	12	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	1. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan pemetaan informasi publik 2. Kurangnya media komunikasi publik yang digunakan 3. Kurangnya partisipasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi	Masyarakat kurang percaya dan puas terhadap layanan komunikasi publik
6	Menurunnya hasil penilaian penerapan SDI di Pemprov Jateng	16	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	1. Komitmen para penyelenggara Satu Data Jawa Tengah kurang 2. Kompetensi teknis dan non teknis para penyelenggara	Kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data Jawa Tengah kurang

Sasaran Kegiatan

	Layanan Publik berbasis elektronik tidak dapat diakses/penurunan performa (melambat)	16	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	Gangguan operasional pada layanan pusat data berupa: - Gangguan perangkat server/storage (kerusakan hardware, overheating, atau kehabisan kapasitas) - Kegagalan sistem pendingin dan listrik (power failure) - Kesalahan konfigurasi sistem (human error) - Serangan siber (malware, ransomware, atau DDoS) - Keterlambatan pemeliharaan infrastruktur pusat data	Masyarakat tidak dapat mengakses layanan publik berbasis elektronik
	Gangguan operasional pada perangkat jaringan internet yang rusak atau tidak memenuhi standar tidak dapat segera ditangani	12	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	- Keterbatasan stok perangkat pengganti - Proses pengadaan yang memerlukan waktu lebih lama dan mengikuti regulasi penggunaan produk dalam negeri. Sedangkan perangkat jaringan yang digunakan tidak ditemukan barang substitusi yang sebanding - Keterbatasan teknisi atau tim operasional	Lumpuhnya operasional kegiatan OPD

	Gangguan operasional pada jaringan Jateng Online	15	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	- Terjadi gangguan pada sumber internet menyebabkan seluruh koneksi Jateng Online ke OPD terhenti (blackout) - Terjadinya FO Cut pada Jaringan Jateng Online - Terdapat gangguan perangkat jaringan induk	Terhentinya operasional layanan pemerintah dan publik serta menurunnya kepercayaan masyarakat.
	Gangguan operasional pada jaringan integrasi Kab/Kota	12	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital	- Terdapat gangguan perangkat jaringan Metro Kab/Kota - Terdapat gangguan pada jaringan penyedia Metro	Gangguan pada jaringan metro menyebabkan kabupaten/kota tidak dapat mengakses layanan publik digital miliknya yang ditempatkan di data center provinsi
	Rekomendasi teknis pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan	12	Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Digital	- Penerapan Arsitektur SPBE belum dipahami secara menyeluruh - Belum tersedia panduan teknis yang lengkap dan terstandarisasi	- Terjadinya duplikasi aplikasi dan inefisiensi sumber daya TI - Ketidakterpaduan data dan layanan antar aplikasi pemerintah - Penurunan nilai maturitas SPBE bidang aplikasi dan arsitektur
	Rendahnya persentase aplikasi pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sistem lain	12	Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Digital	- Kurang/tidak meratanya tim teknis dan anggaran integrasi di OPD - Tidak adanya standar integrasi dan interoperabilitas yang dipatuhi	- Data antar aplikasi tidak sinkron dan sulit dimanfaatkan bersama - Efisiensi layanan digital menurun - Menghambat terwujudnya ekosistem pemerintahan digital terpadu

	Kegagalan terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan pemerintah provinsi jawa tengah	10	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Perangkat daerah belum menerapkan kaedah PDP pada Sistem elektronik	- ketidakpatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi; - Sanksi hukum berdasarkan peraturan perundangan
	Risiko keamanan informasi pada sistem elektronik perangkat daerah tidak terpetakan	12	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Sistem Elektronik Perangkat Daerah yang belum memenuhi standar SMKTI	Penerapan kontrol keamanan tidak sesuai dengan standar keamanan, memungkinkan celah risiko keamanan tidak ditangani dengan baik
	Terjadinya gangguan layanan elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber	Adanya serangan siber pada sistem elektronik pendukung layanan	Layanan elektronik pemerintah provinsi jawa tengah tidak dapat diakses / digunakan;
	Rendahnya persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif mendukung penyebaran informasi publik dapat menghambat efektivitas diseminasi informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.	12	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	• Kurangnya kapasitas dan literasi digital anggota KIM dalam mengelola serta menyebarkan informasi publik. • Koordinasi dan pendampingan yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan KIM. • Rendahnya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunikasi publik. • Kurangnya inovasi dan adaptasi media komunikasi sesuai dengan tren digital dan kebutuhan audiens.	• Informasi program dan kebijakan pemerintah daerah tidak tersampaikan secara merata ke masyarakat. • Berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akibat kurangnya informasi yang akurat. • Potensi meningkatnya disinformasi dan hoaks di masyarakat.

	Isu hoaks dan pemberitaan dengan sentiment negatif semakin menyebar luas	12	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	1. SKPD Pemprov Jateng belum menindaklanjuti isu dengan sentiment negatif 2. Kesulitan menelusuri informasi hoaks terkait Jateng	Hoaks dan pemberitaan dengan sentiment negatif semakin meluas, menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun
	Kurangnya penyebarluasan informasi hasil pembangunan kepala daerah	12	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	Kurangnya media komunikasi publik yang digunakan	Masyarakat tidak mengetahui informasi terkait hasil pembangunan
	Menurunnya jumlah permohonan informasi yang terselesaikan sesuai peraturan perundangan	12	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media	- Kurangnya pemahaman petugas pelayanan informasi - Kurangnya komitmen pimpinan badan publik terhadap pentingnya pelayanan informasi publik	- Permohonan informasi tidak terselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; - Informasi publik tidak tersampaikan ke masyarakat - Meningkatnya jumlah sengketa informasi publik
	Data Prioritas tidak memenuhi prinsip Satu Data	16	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	1. Komitmen pemenuhan data data produsen data kurang 2. Pengelolaan data sektoral di perangkat daerah belum optimal	Akses terhadap data prioritas daerah terhambat
	Data Sektoral Daerah kurang berkualitas	16	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	1. Pengelolaan data sektoral di perangkat daerah belum optimal 2. Kompetensi produsen data tentang pengelolaan data kurang 3. Belum adanya sistem monev dari Walidata Daerah terhadap penerapan pengelolaan data sektoral	Pengguna data mengakses data yang kurang berkualitas

D. RencanaTindak Pengendalian								
Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan *	Indeks Pemerintah Digital	Rendahnya tingkat kematangan indeks Pemdi		20 -Keterlambatan pemenuhan dokumen Pemdi - Ketidak sinkronan dengan SPBE yang sedang berjalan - lemahnya kolaborasi dengan listas OPD - terbatasnya SDM - rendahnya partisipasi pulik - rendahnya keamanan informasi dan privasi - data tidak tersandar	Skor nllai pemdi turun	Menyusun, melaksanakan dan monitoring evaluasi arsitektur dan peta rencana Pemerintah Digital	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Sasaran								
Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK **	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital	Transformasi digital gagal dilakukan		16 -Integrasi yang rumit dikarenakan tidak ada standar yang seragam dapat menyebabkan setiap lembaga pemerintahan membangun sistemnya sendiri, sehingga mempersulit integrasi data dan layanan antar-instansi -Keamanan data yang rentan	-Pengambilan keputusan yang tidak akurat -Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola layanan publik	Mensinergikan pemanfaatan infrastruktur TIK dengan pada stakeholder, baik dari OPD maupun pemerintah Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis **	Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Menurunnya nilai keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah		16 Masih adanya ego sektoral dalam pemenuhan instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Menurunnya kategori keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah	Meningkatkan implementasi regulasi tata kelola data	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Tujuan								
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital *	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Rendahnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis		16 Standar pelayanan tidak dilaksanakan dengan optimal	Penurunan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi atas implementasi RB untuk dilaksanakan oleh semua unit kerja	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Sasaran								
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Indeks Kepuasan Masyarkat Perangkat Daerah	Keterlambatan Respon dan Tanggapan terhadap permintaan Pelayanan Publik		12 -SOP tidak dijalankan dengan baik '-Kurangnya sosialisasi layanan Diskomidigi	Waktu pelayanan menjadi lebih lama	menyusun dan berkomitmrn terhadap pelaksanaan standar Operasi Prosedut (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital **	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah tidak berkualitas dan hanya sebatas pemenuhan dokumen		12 Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam menerapkan pengelolaan risiko	Perencanaan Kegiatan Perangkat daerah kurang baikkarena tidak menerapkan pengelolaan risiko	Melaksanakan FGD dan brainstorming saat penyusunan Risk Register	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	2025-2029